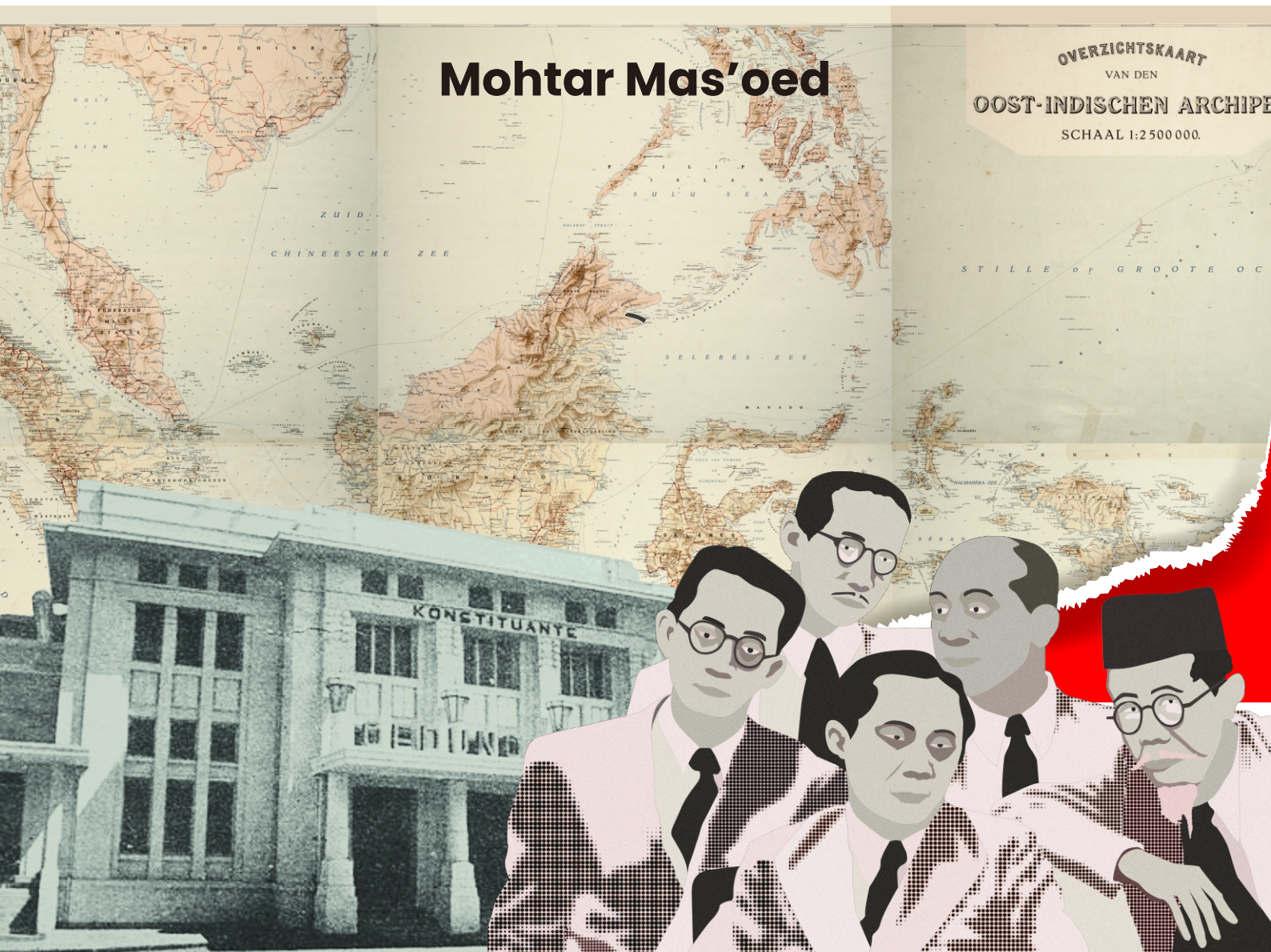


IIS Research Monograph

Dekolonisasi Studi Hubungan Internasional



IIS Research Monograph

Dekolonisasi Studi Hubungan Internasional

No.6/2024

Penulis:

Prof. Mohtar Mas' oed

Editor:

Luqman-nul Hakim

Tata Letak:

Albert Nathaniel

Ilustrator:

Albert Nathaniel

© Institute of International Studies, Universitas Gadjah Mada
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

ISSN 2808-5221

Diterbitkan oleh:

Institute of International Studies, Universitas Gadjah Mada

Alamat Penerbit:

Jl. Sosio Yustisia 1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

iis.fisipol@ugm.ac.id

Seri Dekolonisasi
Studi Hubungan Internasional

Pengantar

IIS Research Monograph kali ini secara khusus menyajikan Seri Dekolonisasi Studi Hubungan Internasional. Seri ini bertujuan menyajikan hasil pemikiran dan penelitian untuk membuka horizon kemungkinan-kemungkinan dalam produksi pengetahuan yang berbasis pada kondisi-kondisi *the Global South*, khususnya terkait warisan kolonialisme dan berorientasi pada politik emansipasi — memperjuangkan tata dunia yang lebih berkeadilan.

Seperti halnya eksperimentasi politik Dunia Ketiga beberapa dekade lalu, *the Global South* tidaklah merujuk pada tempat. Sebagaimana dikatakan Vijay Prashad (2007), ia adalah sebuah proyek: politik sekaligus pengetahuan. Meskipun secara formal negara-negara di belahan dunia telah lepas dari kolonialisme sejak akhir Perang Dunia Kedua, kondisi-kondisi kolonialitas tidak langsung musnah. Selepas perjuangan dekolonisasi, upaya-upaya mempertahankan hierarki kekuasaan dalam tata dunia global terus dilakukan tidak hanya melalui intervensi militer dan eksploitasi ekonomi, tapi terutama melalui politik produksi pengetahuan. Penundukkan kolonialisme terhadap bangsa-bangsa jajahan telah melahirkan, apa yang disebut Walter Mignolo, tiga kondisi kolonialitas sekaligus — kolonialitas kekuasaan (*power*), pengetahuan (*knowledge*), keberadaan (*being*) — yang membentuk kesadaran dan subjek mereka dalam melihat mereka sendiri dan melihat dunia.

Nyatanya, kolonialisasi melalui pengetahuan, termasuk budaya, berlangsung paling subtil, kompleks, bertahan lama, dan terus direproduksi. Dominasi episteme pengetahuan, kita sebut Ero-Amerika-sentrisme, membuat seakan-akan hanya ada kebenaran tunggal, sementara model-model pengetahuan lain dianggap inferior dan tidak ilmiah. Para ilmuwan negeri-negeri bekas jajahan harus mengejar dengan menapaki prosedur ilmiah model dominan yang ditentukan pihak lain — yang belum tentu relevan dan urgen bagi konteks sosial mereka sendiri. Dengan epistemologi dan metodologi yang canggih, disokong oleh *military-industrial-intellectual complex* di negara-negara adidaya, hegemoni pengetahuan ini membutuhkan kita bahwa pengetahuan selalu berkelindan dengan kekuasaan. Isu-isu penelitian dan materi pengajaran yang dianggap penting dirumuskan berdasarkan kepentingan dan proyeksi politik kelompok atau negara dominan untuk mempertahankan relasi kuasa yang timpang.

Dalam konteks besar ini, upaya dekolonisasi studi Hubungan Internasional menjadi sentral. Meskipun terdapat banyak corak dan ragam, semangat dekolonisasi dalam Seri ini setidaknya ditandai oleh tiga hal: (1) reflektivitas teoretik atau kesadaran bahwa upaya teorisasi ditujukan untuk politik emansipasi, (2) perhatian pada peran kreatif kesadaran manusia, dan (3) membangun kritik sosial untuk transformasi sosial. Dalam Seri ini, dekolonisasi dapat berupa upaya membongkar konstruksi dan produksi pengetahuan hegemonik dalam disiplin Hubungan Internasional ataupun eksperimentasi produksi pengetahuan, dengan tema dan perspektif tertentu, yang dibangun atas semangat dekolonisasi ilmu pengetahuan.

Seri Dekolonisasi Studi Hubungan Internasional merupakan platform diskusi yang terbuka dan inklusif. Upaya ini diharapkan dapat membuka horizon kemungkinan baru dalam pengembangan studi Hubungan Internasional.

Luqman-nul Hakim
Editor

Daftar Isi

Menuju dekolonisasi studi Hubungan Internasional.....	1
Erosentrisme dan kanonisasi pengetahuan.....	5
Mitos Westphalia.....	10
Positivisme sebagai epistemologi dominan.....	13
Kolonialisme Eropa dan dekolonisasi.....	17
Dekolonisasi dihadap kolonialitas.....	20
Geopolitik dan “Military-Intellectual Complex”	27
Dekolonisasi pengetahuan.....	29
Strategi dekolonisasi studi Hubungan Internasional.....	31
Pengetahuan sebagai sarana emansipasi manusia.....	35
Referensi.....	39

Menuju dekolonisasi studi Hubungan Internasional

Kajian ini membahas isu penting yang kerap diabaikan dalam studi Hubungan Internasional di Indonesia, yakni upaya dekolonisasi pengetahuan dan studi Hubungan Internasional. Perhatian terhadap isu ini dipicu oleh pertanyaan menggugah yang diajukan oleh Ramon Grosfoguel kira-kira sepuluh tahun lalu sebagai berikut:

Bagaimana mungkin kanon pemikiran dalam seluruh disiplin ilmu sosial kemasyarakatan di universitas-universitas yang ter-Barat-kan didasarkan pada pengetahuan yang diproduksi oleh *segelintir orang dari lima negara Eropa Barat* (Italia, Perancis, Inggris, Jerman dan Amerika Serikat)? Bagaimana mungkin segelintir orang dari lima negara ini mencapai sebuah keistimewaan epistemik sampai pada titik di mana pengetahuan mereka hari ini dianggap superior dibandingkan dengan pengetahuan dari belahan dunia lain? Bagaimana mereka kemudian memonopoli otoritas pengetahuan di dunia? Mengapa semua hal yang kita ketahui hari ini sebagai disiplin ilmu sosial, sejarah, filsafat atau teori kritis itu didasarkan pada pengalaman sosial-historis dan cara pandang sejumlah orang dari lima negara ini? (Grosfoguel, 2013: 74, penekanan oleh penulis).

Ilmu sosial dan humaniora yang kita pelajari sebagian besar berasal dari pikiran beberapa orang dari lima negara itu. Beberapa orang istimewa itu menikmati *epistemic privilege*, menghasilkan pengetahuan yang sampai hari ini dianggap lebih unggul dari pada pengetahuan yang dihasilkan oleh orang lain di seluruh jagad raya. Mengapa? Konteks sosial, kultural, ekonomi, dan politik apa yang mendorong ketimpangan hierarki yang luar biasa itu?

Pertanyaan seperti itu tentu saja juga diajukan pada studi Hubungan Internasional, terutama yang konvensional (*mainstream*). Mengapa studi ini sebagian besar masih dilakukan oleh orang-orang di Eropa dan Amerika Utara, yang umumnya membahas masalah mereka sendiri? Amitav Acharya juga pernah mengajukan pertanyaan yang mirip, yaitu mengapa tidak ada teori Hubungan Internasional dari negara-negara non-Barat? Bagi para ilmuwan Barat, yang non-Barat seolah-olah diidentifikasi sebagai “sang Liyan” (*the Other*), yang tidak penting dan bisa dikesampingkan. Kalau toh

diperhatikan, “sang Liyan” itu berfungsi sebagai objek penerapan. Ia tidak menjadi subjek penting dalam produksi pengetahuan.

Menurut de Sousa Santos (2014), semua kurikulum pengajaran Ilmu Sosial atau Humaniora di semua perguruan tinggi gaya-Barat di seluruh dunia memuat teori yang dihasilkan oleh segelintir sarjana dari lima negara Eropa Barat itu. Bahkan, dalam studi tingkat pasca-sarjana, penguasaan para pembelajar mengenai teori-teori itu sering dijadikan syarat utama sebelum mereka merumuskan rencana penelitiannya sendiri.

Seperti akan dibahas dalam tulisan ini, teori muncul dari konseptualisasi berdasar pengalaman sosial-historis dan perspektif berdasar ruang-waktu yang spesifik. Logikanya, pengetahuan yang muncul dari pengalaman dan perspektif orang-orang dari lima negara itu bisa diduga hanya relevan untuk konteks geografi, sosial, dan politik mereka. Dengan kata lain, pengetahuan beberapa orang itu sebenarnya bersifat “*provincial*”. Tetapi, kenyataannya, pengetahuan itu disajikan kepada para pembelajar seolah-olah bersifat “*universal*”. Pengetahuan tentang Barat dikemas sehingga memiliki kualitas “universalitas”. Seolah-olah pengetahuan yang dihasilkan oleh orang-orang dari lima negara Eropa Barat tersebut memiliki keajaiban bersifat universal. Teori mereka dianggap paling sah untuk menjelaskan kenyataan sosial-historis masyarakat di seluruh dunia.

Dengan demikian, yang selama ini kita kerjakan pada dasarnya adalah mempelajari teori yang lahir dari pengalaman suatu wilayah tertentu di dunia Barat dengan dimensi ruang-waktunya sendiri dan menerapkannya ke lokasi geografi lain, walaupun pengalaman dan ruang-waktu mereka berbeda. Penelusuran silabus berbagai ilmu sosial dan humaniora, termasuk Hubungan Internasional, di berbagai perguruan tinggi gaya-Barat menunjukkan bahwa yang diajarkan umumnya adalah pengetahuan berdasar pengalaman sosial-historis bangsa-bangsa Barat. Dalam praktek, teori karya ilmuwan Eropa Barat dan Amerika Utara menikmati “*epistemic privilege*”, sedangkan karya ilmuwan dari belahan dunia lain mengalami “*epistemic inferiority*”. Di sini, bisa dikatakan bahwa “*epistemic privilege*” dan “*epistemic inferiority*” merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

Secara teoritik, produksi pengetahuan sosial dan humaniora dipengaruhi oleh tiga dimensi besar yang saling berkelindan. Pertama, dimensi epistemologi, kosmologi, dan perspektif yang diterapkan oleh ilmuwan yang bersangkutan. Kedua, dimensi konteks ruang-waktu dari proses produksi pengetahuan itu. Ketiga, dimensi geopolitik pengetahuan yang melandasi proses itu. Cara pandang ilmuwan Eropa yang menghasilkan pengetahuan sosial dan humaniora muncul sebagai akibat dari

pergulatan mengenai kebebasan manusia untuk berpikir lepas dari belenggu keyakinan agama yang dilembagakan oleh Gereja. Proses ini berlangsung kira-kira abad 14-17, yang dikenal sebagai “Abad Pencerahan” (*Aufklärung*). Dimensi ruang-waktu ini sangat sentral untuk diperhatikan karena pada masa itu pula muncul pengorganisasian politik yang membagi imperium di Eropa menjadi berbagai “negara-bangsa”, yang masing-masing mengembangkan kepentingan dan identitas nasionalnya, termasuk dalam produksi pengetahuan.

Sebagai dampaknya, pengetahuan yang diproduksi berdasar epistemologi, konteks ruang-waktu, dan geopolitik pengetahuan berbeda dianggap “*inferior*” dibandingkan dengan pengetahuan “*superior*” yang dihasilkan oleh beberapa ilmuwan Barat di negara-negara Eropa Barat itu. Pengalaman dan perspektif non-Barat, yang sekarang dikenal sebagai *Global South*, dianggap rendah dan tidak masuk dalam prinsip pemikiran ilmu sosial dan humaniora Eropa itu (Hakim, et.al., 2021).

Proses sejarah apa yang menghasilkan struktur pengetahuan berdasar *epistemic racism* itu? Untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan perbincangan yang panjang dan melibatkan berbagai dimensi. Dalam studi ini perhatian akan dipusatkan pada sejarah geopolitik kolonialisme, yang memunculkan fenomena kolonialitas (“*coloniality*”) dan kemudian mendorong munculnya gerakan penentangan, dekolonisasi.

Urgensi dekolonisasi pengetahuan

Salah satu akar dari persoalan besar dalam politik produksi pengetahuan studi Hubungan Internasional adalah isu ketimpangan antar-bangsa. Perdebatan akademik yang berlangsung dalam studi Hubungan Internasional menunjukkan bahwa ketimpangan antar-bangsa dalam beberapa bidang makin memburuk. Ketimpangan itu berakar pada struktur kuasa kolonial dan tata-dunia yang tidak-adil. Sampai sekarang, neo-kolonialisme masih memperkuat kekuasaan di tangan sekelompok kecil orang dan melanggengkan tata dunia yang timpang. Akhir-akhir ini manifestasi ketimpangan internasional ini semakin jelas: dampak pandemi COVID-19 tidak merata, si miskin terkena lebih parah daripada si kaya; kerusakan lingkungan hidup dan penjarahan lahan semakin parah; politik yang melahirkan pemerintahan ekstrimkanan dan otoriter; polusi ekosistem informasi yang menghasilkan kebencian dan xenophobia. Semua ini diduga berakar pada ketidak-adilan global. Ketimpangan kuasa yang berlangsung sejak masa kolonial sampai hari ini merupakan isu struktural yang tidak bisa diabaikan dalam studi tentang bangsa-bangsa.

Pembahasan dalam studi ini dipusatkan pada bagaimana para ilmuwan yang berasal dari atau yang bersimpati kepada *the Global South* mengembangkan kreativitasnya untuk menggambarkan persoalan, menjelaskan duduk-perkaranya dan menyajikan arahan tentang bagaimana memunculkan studi Hubungan Internasional yang mendorong emansipasi bangsa-bangsa yang tertindas. Secara khusus, studi ini bermaksud membahas beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana ilmuwan Eropa dan Amerika Utara memproduksi dan menyebarkan pengetahuan tentang Hubungan Internasional yang kita kenal sekarang ini?
2. Apa hubungan antara pengembangan studi Hubungan Internasional dengan kepentingan geo-politik dan geo-ekonomi negara-negara besar Barat?
3. Bagaimana ilmuwan Asia, Afrika, dan Amerika Latin melakukan dekolonisasi terhadap studi Hubungan Internasional mengenai wilayah mereka? Strategi dan mekanisme apa yang mereka pakai?

Sebagaimana dibahas di bagian-bagian selanjutnya, secara ringkas, studi dekolonisasi studi Hubungan Internasional ini menegaskan beberapa argumen sentral sebagai hal berikut:

1. Kolonialitas studi Hubungan Internasional terjadi akibat beberapa perkembangan sejarah pengetahuan dalam konteks politik dan geopolitik, terutama di wilayah Eropa dan Amerika.
2. Perkembangan studi Hubungan Internasional "*mainstream*" memperoleh dukungan kuat dari militer, ilmuwan sosial, dan bisnis karena bisa dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan nasional negara adidaya.
3. Melalui peningkatan keaneka-ragaman epistemologi, dekolonisasi merupakan jalan keluar untuk mengatasi parokialisme studi Hubungan Internasional yang Erosentris.

Erosentrisme dan kanonisasi pengetahuan

Salah satu tantangan yang dihadapi para pembelajar studi Hubungan Internasional di luar belahan dunia Eropa-Amerika adalah orientasi keilmuannya yang sangat “Erosentris” (atau “Anglo-Saxon”-sentris). Objek yang dipelajari dalam disiplin ini ditentukan berdasarkan pada sudut pandang bangsa-bangsa “Barat” itu. Sudut pandang yang sejatinya terbentuk berdasarkan pengalaman sejarah bangsa-bangsa di kawasan itu dalam menangani persoalan sosial, budaya, politik, dan ekonomi internal mereka.

Mengikuti cara berpikir kontekstual, studi ini berasumsi bahwa konteks tempat dan waktu berpengaruh besar terhadap cara pandang yang dianut seseorang atau dalam politik produksi pengetahuan. Dengan demikian, deskripsi dan konseptualisasi mengenai fenomena sosial oleh ilmuwan “Barat” patut diduga sangat dipengaruhi oleh konteks ruang dan waktu, yaitu Eropa di masa kejayaannya. Sebagai akibatnya, para pembelajar ilmu sosial yang kritis (termasuk ilmuwan Hubungan Internasional) mesti mempertimbangkan konteks yang menghasilkan perspektif khas ini, yang dalam wacana keilmuan dikenal sebagai “Erosentrisme”.

Apa yang dimaksud Erosentrisme dan bagaimana implikasinya bagi kanonisasi ilmu sosial, khususnya studi Hubungan Internasional?

Sepanjang sejarahnya, terutama sejak dilembagakan sebagai bidang studi dalam perguruan tinggi, ilmu sosial selalu terpusat pada Eropa (Wallerstein 1997: 1; lihat juga Amin, 1989). Eropa dikonstruksi sebagai pusat, sementara belahan dunia lain hanya halaman belakang. Sebetulnya, proses “Eropa sebagai pusat dunia” itu tidak mengherankan karena dibentuk oleh sejumlah kondisi sebagai berikut. **Pertama**, ilmu sosial adalah produk sistem-dunia dan sebagai bangsa yang waktu itu dominan, Eropa mengembangkan geo-kultur dunia modern yang mengistimewakan Eropa. **Kedua**, dalam format yang dilembagakan di perguruan tinggi waktu itu, ilmu sosial umumnya bermula di Eropa. Bahkan, bisa dikatakan bahwa ilmu sosial modern paling tidak sampai 1945 umumnya berasal dari pemikiran tokoh-tokoh ilmuwan dari lima negara, yaitu Inggris, Itali, Jerman, Perancis, dan Amerika Serikat (AS). **Ketiga**, sampai hari ini, sebagian besar ilmuwan sosial terdiri dari bangsa yang secara kultural Eropa. **Keempat**, terkait itu semua, ilmu sosial umumnya dikembangkan untuk

menangani persoalan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa Eropa, yang memang sejak lama mendominasi keseluruhan sistem-dunia.

Apa yang dipelajari dalam ilmu sosial dan bagaimana mempelajarinya masih dipengaruhi oleh ke-Eropa-an. Ontologi, epistemologi, metodologi, dan teori yang dihasilkannya mencerminkan tempat kelahirannya itu. Ini yang disebut sebagai Erosentrisme.

Menurut Immanuel Wallerstein (1997: 3-5), terdapat lima karakteristik Erosentrisme yang mewarnai perkembangan ilmu sosial:

Pertama, konsepsi tentang **historiografi**. Yaitu, cara bangsa Eropa menuliskan sejarahnya sendiri. Sejak abad 19, bangsa-bangsa Eropa telah mendominasi dunia. Benua mereka berkembang menjadi wilayah yang secara ekonomi paling kaya dan secara militer paling kuat. Mereka menguasai teknologi paling maju dan paling banyak menciptakan teknologi baru. Ini adalah prestasi yang tampaknya tidak bisa dibantah. Dan itulah yang dipakai untuk memberi pembenaran terhadap status istimewa Eropa dalam kaitan dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Ketika diajukan pertanyaan, apa yang membuat bangsa-bangsa Eropa bisa mencapai keberhasilan begitu mengesankan, sedangkan bangsa-bangsa non-Eropa tidak? Seringkali, pertanyaan ini dijawab dengan menunjuk pada sejarah revolusi keilmuan Eropa pada abad 16-17, yakni ketika gagasan modern mengenai sains dan pemikiran ilmiah berkembang, dan sains tumbuh menjadi disiplin terlembaga dalam pendidikan tinggi (Cruse, 2019) dan pada masa “Pencerahan” atau “*Renaissance*” (akhir abad 17-18). Bahkan, sejarah itu dirunut sampai ke masa Yunani Kuno, beberapa zaman sebelum Masehi.

Historiografi Eropa menegaskan bahwa Eropa berkembang menjadi hebat karena nenek-moyangnya melakukan hal-hal yang hebat. Fakta memang menunjukkan bahwa bangsa Eropa bisa menyelesaikan persoalan dasar dalam kehidupan politik. Misalnya, konflik antara Raja dengan rakyatnya diselesaikan melalui “Magna Charta” (tahun 1215); persoalan hubungan antar-negara disepakati dalam “Perjanjian Westphalia” (tahun 1648). Masalah ekonomi diselesaikan melalui “Revolusi Industri” (mulai di Inggris sekitar tahun 1760) yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi untuk memberi pekerjaan bagi penduduk wilayah Eropa. Ketika pertumbuhan ekonomi itu menimbulkan persoalan sosial, terutama kesenjangan ekonomi, mereka menanganinya dengan melembagakan “*Welfare State*” (mulai awal abad 20). Itulah pelajaran dari Eropa mengenai bagaimana membina bangsa dan kebangsaan yang bersatu, mengembangkan pelembagaan politik yang bertanggung

jawab pada rakyat dan membangun ekonomi yang menyejahterakan warganya. Pelajaran yang dianggap perlu untuk ditularkan ke semua bangsa di dunia.

Tetapi, yang hilang dari narasi itu adalah bagaimana bangsa-bangsa Eropa membiayai transformasi ekonomi, sosial, dan politik mereka yang luar biasa itu? Yang tidak disebut dalam historiografi itu adalah keterlibatan bangsa-bangsa non-Eropa dalam pembangunan Eropa. Yang disembunyikan adalah sejarah perlakuan bangsa-bangsa Eropa terhadap bangsa-bangsa non-Eropa sesudah tahun 1492, ketika Eropa bertemu dengan kehidupan non-Eropa. Yaitu sejarah kolonialisme dan imperialisme Eropa terhadap bangsa-bangsa di berbagai benua lain.

Kedua, konsepsi tentang **universalisme**. Ilmu sosial yang Erosentris memuat asumsi tentang adanya kebenaran ilmiah yang berlaku universal, di sepanjang waktu dan di semua ruang. Dan yang diuniversalkan adalah apa yang telah dicapai di Eropa; keunggulan prestasi kultural bangsa-bangsa Barat. Yang diunggulkan terutama adalah sains sebagai kegiatan utama dalam bidang ilmu pengetahuan.

Asumsinya adalah bahwa kehidupan dunia ini diatur oleh hukum deterministik dalam wujud yang linear-ekuilibrium. Dengan hukum seperti ini ilmuwan bisa secara deduktif menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu dan meramalkan apa yang akan terjadi.

Apa implikasinya bagi ilmu sosial? Ilmuwan sosial bisa menemukan proses universal yang menjelaskan perilaku manusia dan hipotesis apapun yang bisa diverifikasi; dianggap berlaku di segala waktu dan tempat. Pribadi si peneliti tidak penting, karena ilmuwan itu bekerja dengan tidak mempertimbangkan persoalan nilai ("*value-free*"). Ia adalah analis yang dianggap bisa melepaskan nilai-nilai yang dianutnya sehingga tidak berpengaruh terhadap hasil penelitiannya. Juga, asal-usul atau sumber data tidak penting. Asalkan data diperlakukan dengan semestinya, asal-usul data tidak berpengaruh. Karena proses itu dianggap konstan.

Dengan kata lain, konteks tidak penting. Dimana pun suatu kejadian sosial itu terjadi, penelitiannya dilakukan dengan tidak berbeda. Teori yang dikembangkan di Eropa dianggap berlaku untuk fenomena yang sama di seluruh dunia. Ini yang dimaksud dengan universalisasi teori. Sementara belahan dunia non-Eropa dianggap hanya tempat untuk pengaplikasian teori universal itu.

Ketiga, konsepsi tentang **peradaban (*civilization*)**. Konsep ini merupakan sekumpulan karakteristik sosial yang dilawankan dengan barbarisme atau *primitiveness*. Eropa menganggap diri satu-satunya yang ber-peradaban (*civilized*). Tetapi mengenai hal ini ada perbedaan pengertian. Sebagian orang mengukur

peradaban dengan derajat “modernitas”, yaitu kemajuan teknologi, peningkatan produktivitas ekonomi, dan keyakinan mengenai kemajuan. Bagi sebagian yang lain, peradaban berarti peningkatan kebebasan individu dalam berhadapan dengan aktor sosial lain, seperti komunitas, negara, dan lembaga agama. Kelompok yang lain lagi mengartikan peradaban sebagai perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari, sopan-santun. Ada lagi kelompok yang memandang peradaban sebagai penurunan atau pengurangan tindak kekerasan dan kebrutalan. Dan tentu saja, bagi sebagian besar orang, peradaban memuat kombinasi dari berbagai atau semua sifat-sifat yang telah disebutkan itu.

Ketika bangsa-bangsa Barat melakukan penjajahan atas bangsa-bangsa non-Barat, mereka merasa melakukan kewajiban suci, yaitu memperkenalkan peradaban kepada orang-orang di tanah jajahan itu. Karena ilmu sosial adalah produk dari proses sejarah yang sama, maka nilai-nilai itu merasuk ke dalam kegiatan keilmuan mereka. Nilai dan norma yang berasal dari pengalaman sejarah Eropa itu dipakai sebagai rujukan dalam mempelajari bangsa-bangsa non-Eropa. Bahkan, nilai dan norma ini nampak jelas dipakai ketika negara-negara Barat pada dasawarsa 1990-an merumuskan “hak untuk campur-tangan dalam urusan dalam negeri” di negara-negara yang dianggap melanggar hak asasi manusia (yang umumnya di negara-negara non-Eropa).

Keempat, konsepsi tentang **Orientalisme**. Secara singkat, Orientalisme dimaknai sebagai konsepsi bangsa Barat tentang bangsa-bangsa non-Barat (Said, 1978). Konsep ini merujuk pada pernyataan-pernyataan khas dan abstrak mengenai karakteristik peradaban non-Barat. Pada awalnya, Orientalisme adalah sebutan untuk suatu kegiatan keilmuan yang berasal dari masa Abad Tengah Eropa, ketika para biarawan-intelektual Kristen berusaha mempelajari agama-agama non-Kristen dengan mempelajari bahasa dan membaca kitab-kitab suci mereka. Tentu saja, para biarawan itu sudah berkeyakinan bahwa yang benar adalah ajaran Kristen. Dalam perkembangannya, pada abad 19, Orientalisme menjadi lebih sekuler, tetapi bentuk kegiatan kaum Orientalis tidak banyak berubah. Mereka masih mempertahankan pandangan yang *binary*; kalau sebelumnya antara Kristen vs tidak-beragama, sekarang antara Oksidental vs Oriental, modern vs non-modern. Dalam ilmu sosial, muncul dikotomi dalam berbagai macam: *Gemeinschaft* vs *Gesellschaft*, solidaritas mekanik vs organik, legitimasi tradisional vs rasional-legal *legitimation*, statika vs dinamika, dan sebagainya.

Kritik terhadap Orientalisme bukan hanya mengenai kelemahan keilmuannya, tetapi terutama berkaitan dengan konsekuensi politik dari konsep-konsep yang mereka kembangkan. Orientalisme dianggap memberi legitimasi pada posisi dominan Eropa. Orientalisme bahkan berperan penting sebagai juru-bicara ideologis bagi penguasa

imperial dalam mendominasi masyarakat tanah jajahan. Orientalisme mencerminkan kegiatan ilmuwan Eropa untuk memperoleh pengetahuan mengenai Dunia Timur dengan tujuan mendominasi bangsa Timur (Said, 1978).

Kelima, konsepsi tentang **kemajuan (*progress*)**. Tema dasar *Aufklärung* Eropa adalah keyakinan akan *progress*. Manusia bisa lepas dari kungkungan siklus-hidup yang seperti lingkaran setan. Sejak abad 19, konsep ini adalah konsensus Eropa. Gagasan mengenai *progress* melandasi teorisasi ilmu sosial dan bahkan menjadi motor penggerak dari semua ilmu sosial terapan. Kita belajar ilmu sosial karena kita ingin memahami kehidupan sosial dengan lebih baik dan dengan demikian bisa mendorong *progress* di berbagai bagian dunia; paling tidak dengan membantu menyingkirkan berbagai penghalangnya.

Penggunaan metafora evolusi atau *development* bukan semata-mata untuk menggambarkan sesuatu—kata-kata metaforik itu terutama dimaksudkan sebagai resep untuk bertindak. Ilmu sosial menjadi penghasil resep bagi pembuat kebijakan. Orientasi ini juga yang menjadi alasan keterlibatan para ilmuwan sosial Barat, terutama Amerika Serikat, dalam perumusan kebijakan pembangunan di negara-negara non-Barat. Yang kemudian masuk ke dalam dokumen rencana pembangunan masing-masing negara penerima bantuan mereka.

Lima karakteristik Erosentrisme itu juga sangat jelas mendominasi perkembangan studi Hubungan Internasional. Sejak awal masa studinya, para pembelajar studi Hubungan Internasional diperkenalkan dengan peran penting Perjanjian Westphalia yang terjadi tahun 1648—yang dianggap sebagai titik sejarah paling sentral bagi lahirnya studi Hubungan Internasional.

Mitos Westphalia

Narasi tentang Perjanjian Westphalia tahun 1648 dikembangkan oleh para ahli hukum internasional sejak abad 19 dalam rangka mengelola hubungan dalam imperium Eropa (Kayaoglu, 2010: 193-200). Narasi itu dimanfaatkan untuk menunjukkan keberhasilan Eropa. Perjanjian itu menghasilkan resolusi konflik yang mengakhiri peperangan yang menghantui Eropa selama puluhan tahun. Kesepakatan di Westphalia itu merupakan solusi terhadap masalah anarki dalam hubungan antar-negara itu. Perjanjian itu juga meletakkan fondasi bagi perpolitikan modern, terutama penciptaan lembaga politik baru, yaitu negara-bangsa, yang didasarkan pada dua prinsip: kedaulatan nasional dan sekularisasi (wewenang politik yang diurus oleh negara dipisahkan dari wewenang keagamaan yang diurus wewenang gereja).

Berdasarkan perjanjian itu, negara-bangsa memiliki hak monopoli atas sarana kekerasan di dalam wilayah nasional masing-masing dan mengendalikan sarana politik luar negeri, seperti perang dan diplomasi. Negara-bangsa mengembangkan toleransi politik dengan menghormati kedaulatan nasional masing-masing, yang kemudian menghasilkan banyak kesepakatan mengenai hukum yang mengatur hubungan di antara mereka.

Dalam hubungan dengan agama, perjanjian itu menerapkan sekularisme. Dengan konsep ini, perjanjian Westphalia memangkas klaim wewenang universal Gereja Katolik dan memungkinkan pemisahan ranah publik kenegaraan dan ranah privat keagamaan. Prinsip non-intervensi terhadap urusan agama digabungkan dengan prinsip baru toleransi dalam beragama sehingga menghasilkan koeksistensi damai di kalangan bangsa-bangsa yang selama puluhan tahun terlibat konflik terkait agama.

Berbagai prinsip dan lembaga yang muncul dari Perjanjian Westphalia tahun 1648 ini dijadikan ideal Eropa yang memungkinkan transformasi awal masa modern negara-negara di benua sehingga menjadi suatu masyarakat yang terdiri dari negara-negara. Suatu masyarakat dengan kesamaan gagasan dan pelebagaan berdasar toleransi politik dan agama. Masyarakat internasional "Westphalia" ini terkonsolidasi di Eropa dan kemudian melalui kolonialisme Eropa diperluas ke seluruh dunia sehingga menjadi kerangka kerja politik dan hubungan antar-bangsa sampai sekarang (Bull dan Watson, 1984).

Ketika studi Hubungan Internasional mulai dikembangkan, narasi Westphalia ini merupakan sumber dasar ontologi dan epistemologinya. Penataan orde internasional berbasis negara-bangsa mendorong munculnya mekanisme kerja dalam bentuk “masyarakat internasional” di Eropa. Sesudah Magna Charta di Inggris tahun 1215, yang mengatur hubungan politik antara pemerintah dan rakyat sehingga Raja wajib menghormati hak-hak rakyatnya, terutama dalam urusan agama, Perjanjian Westphalia adalah tonggak penting dalam kehidupan politik Eropa. Westphalia dianggap sebagai prestasi yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, yang umumnya dianggap *barbaric*. Dalam narasi itu, bangsa-bangsa non-Eropa digambarkan masih dalam kondisi anarki. Mereka bisa menjadi bagian dari interaksi internasional sesudah memenuhi “standar peradaban Eropa” dan diizinkan untuk bergabung dalam masyarakat internasional yang arsitekturnya dibangun bangsa-bangsa Eropa.

Erosentrisme, dengan Westphalia sebagai mitosnya, merambah ke berbagai dimensi kehidupan sosial dan politik. Termasuk studi Hubungan Internasional yang berkembang dengan bias Erosentris ini.

Mitos Westphalia ini dipelihara dan dilanggengkan karena menunjukkan superioritas Eropa sebagai mesin pendorong utama perkembangan dunia, arsitek utama sejarah dunia, pendukung utama nilai-nilai dan nalar universal, dan sebagai yang paling maju untuk berperan sebagai model utama bagi kemajuan manusia. Apa yang berhasil dikerjakan di Eropa dianggap bisa diterapkan di kalangan bangsa-bangsa lain. Pengalaman Eropa, yang sebenarnya *provincial*, dianggap bisa diterapkan secara universal. Demikianlah, studi Hubungan Internasional menjadi Erosentris.

Dalam perkembangannya, Erosentrisme Westphalia menimbulkan masalah serius bagi studi Hubungan Internasional. Secara ontologis, apa yang bisa dipelajari oleh studi Hubungan Internasional terbatas pada aktor negara-bangsa dan dinamika hubungan di antara mereka. Aktor non-negara tidak bisa dihadirkan sebagai objek analisis. Praktek hubungan internasional, terutama sejak abad 20, berkembang pesat meliputi berbagai dimensi, militer, politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan melibatkan berbagai aktor non-negara, tetapi studi Hubungan Internasional tidak bisa mengakomodasi perkembangan baru itu. Studi Hubungan Internasional tidak bisa mengembangkan teori mengenai saling-ketergantungan internasional dan kecenderungan pluralisme dalam arena internasional. Sampai 1960-an, yang dipelajari dalam studi Hubungan Internasional dan cara mempelajarinya masih terbatas pada persoalan politik dan keamanan negara. Perkembangan studi Hubungan Internasional masa itu mengabaikan dimensi lain kehidupan manusia, sosial, ekonomi, dan kultural, yang memerlukan pemikiran dan solusi.

Erosentrisme juga sarat dengan prasangka etnosentris dan rasis. Tetapi, bukan hanya itu. Etnosentrisme juga terkait erat dengan kekerasan dan hubungan asimetris. Privilese Eropa sering memberi pembenaran pada tindakan kekerasan dalam pengelolaan hubungan kolonial. Erosentrisme juga memungkinkan munculnya Orientalisme, suatu pandangan keilmuan Barat yang menggambarkan bangsa-bangsa Timur sebagai ras yang primitif, eksotik, dan tidak rasional. Konsekuensinya, bangsa-bangsa Barat sebagai ras yang unggul merasa berkewajiban melakukan intervensi untuk mengentaskan bangsa-bangsa Timur dari keterbelakangan. Dalam prakteknya, intervensi ini menimbulkan penindasan dan dominasi oleh bangsa-bangsa Barat terhadap bangsa-bangsa Timur untuk memperoleh keuntungan material. Dengan kata lain, Erosentrisme bukan hanya memungkinkan terjadinya tindak kekerasan, tetapi juga mengesahkannya.

Berakhirnya Perang Dunia II mendorong terjadinya pergeseran kekuatan geopolitik, termasuk munculnya gerakan revolusioner anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Dalam suasana ini muncul banyak kritik terhadap Erosentrisme. Walaupun begitu, bidang kegiatan produksi pengetahuan masih didominasi oleh Erosentrisme, atau lebih tepatnya, Ero-Amerika-sentrisme. Salah satu yang masih berpengaruh kuat adalah dominasi positivisme dalam epistemolog studi Hubungan Internasional. Positivisme yang dimaksud adalah aliran berpikir yang memandang bahwa pernyataan saintifik hanya bisa dipercaya kalau didasarkan pada bukti empirik, yaitu "fakta" yang kasat-indera dan diperoleh melalui metode saintifik.

Positivisme sebagai epistemologi dominan

Persoalan besar yang dihadapi oleh ilmu Hubungan Internasional, seperti halnya ilmu-ilmu sosial yang lain, adalah kemajemukan teori. Karena teori sosial hampir tidak bisa diuji melalui eksperimen laboratorium, realitas sosial yang sama selalu dapat dijelaskan melalui beberapa atau ragam teori. Lalu, bagaimana orang bisa menentukan teori mana yang lebih unggul dari pada yang lain? Akhirnya, penentuan itu lebih merupakan “*judgment*”. Apa dasar bagi pembuatan “*judgment*” itu?

Umumnya dikenal tiga kriteria untuk menentukan apakah suatu teori lebih unggul dari pada yang lain. **Pertama**, kriteria konsistensi, yang dibagi dalam konsisten internal dan eksternal. Suatu teori dianggap mempunyai konsistensi internal kalau logikanya cukup konsisten. Sementara, ia dianggap memiliki konsistensi eksternal kalau pernyataan teoritik itu sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. **Kedua**, kriteria relevansi. Suatu teori dianggap relevan kalau isu-isu yang diajukannya cukup relevan bagi penyelesaian persoalan kemasyarakatan. **Ketiga**, kriteria politik. Kriteria ini menyangkut masalah kepentingan siapa yang dilayani oleh teori itu? Siapa yang diuntungkan oleh teori itu?

Pembahasan berbagai teori dalam bagian terdahulu umumnya hanya menyentuh kriteria pertama. Yaitu, menilai struktur logika dan kaitan antara argumen teoritik dengan dukungan empirisnya. Mengapa? Karena berbagai teori itu memang tidak dirancang untuk mencapai tujuan lebih jauh dari itu. Sebagai teorisasi yang didasarkan pada paham positivisme, tujuan para ilmuwan dalam berteori adalah mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena sosial apa adanya. Untuk memahami hal ini kita perlu menelaah asumsi dasar positivisme.

Epistemologi Positivis

Positivisme didasarkan pada tiga argumen pokok: **Pertama**, kebenaran sebagai korespondensi atau kesesuaian antara teori dengan fakta. **Kedua**, kesamaan metodologi antar-ilmu. Semua ilmu, eksakta maupun sosial, bisa berkembang dengan metodologi yang sama. **Ketiga**, penelitian ilmiah bersifat bebas-nilai (Neufeld, 1995:33-37).

Kebenaran sebagai kesesuaian antara teori dan fakta. Pengetahuan positif (berbeda dengan pengetahuan 'metafisik' atau 'teologi') dianggap bisa diandalkan karena bersesuaian langsung dengan dunia empiris yang bisa diamati oleh indera manusia. Dengan kata lain, yang menjamin 'kebenaran' pengetahuan positif adalah kesesuaian antara teori dan fakta empiris. Suatu teori dianggap 'benar' kalau didukung oleh bukti empiris. Karena teori atau paradigma dinilai berdasar ketepatannya dalam menggambarkan fakta.

Pendapat ini didasarkan pada asumsi tentang keterpisahan antara subjek peneliti dengan objek penelitiannya. Yakni, bahwa peneliti bisa memisahkan diri dengan tegas dari objek yang ditelitinya. Dunia nyata (objek) dianggap ada, yang terpisah dan bisa dibedakan dari konstruksi teoritik si ilmuwan peneliti (subjek). Konstruksi teoritik yang dibuat oleh subjek atau ilmuwan itu bisa dirumuskan dalam bahasa observasi yang non-idiosinkratik dan secara inter-subjektif valid dan dengan demikian bisa menangkap realitas (fakta) secara langsung. Dengan kata lain, konstruksi teoritik itu bisa dibuat bebas dari prasangka ilmunya. Secara metodologis, pengaruh identitas ilmuwan itu bisa dipisahkan. Hanya dengan cara itulah diyakini bahwa pengetahuan yang sejati dapat dihasilkan, yaitu pengetahuan yang sesuai dengan kenyataan objektif.

Seperti dikatakan oleh K.J.Holsti (1985: vii), patokan untuk menilai berbagai paradigma adalah isomorfisme dan kesesuaian dengan fakta-fakta yang dikaji. Artinya, mutu suatu paradigma ditentukan oleh ketepatannya dalam menggambarkan kenyataan. Selanjutnya menurut Holsti:

tujuan utama kegiatan teoritik adalah meningkatkan pemahaman kita mengenai jagad politik internasional meningkatkan pengetahuan kita mengenai dunia nyata dengan cara membimbing penelitian dan penafsiran data (Holsti, 1989:255-6).

Kesamaan metodologi ilmu pengetahuan. Pendukung positivisme berpendapat bahwa fenomena sosial bisa dipelajari dengan menerapkan metodologi penelitian yang dikembangkan untuk mempelajari alam fisik. Argumen ini didasarkan pada asumsi tentang naturalisme, yang yakin bahwa tidak ada perbedaan antara dunia alamiah dan dunia sosial. Dunia sosial mengandung jenis regularitas yang sama dengan yang ditemukan dalam dunia alamiah. Regularitas perilaku sosial itu dianggap tidak terpengaruh oleh waktu, tempat, dan sifat pengamatnya. Dengan demikian, kemajuan ilmu sosial bisa dicapai melalui cara yang dipakai ilmu alamiah, yaitu melalui uji hipotesis dan replikasi.

Pengetahuan ilmiah bebas-nilai. Pengetahuan yang dihasilkan melalui metodologi dan desain penelitian positivis adalah pengetahuan tentang fenomena dunia objektif (empiris). Pengetahuan saintifik tidak menangani fenomena non-faktual karena sains tidak memiliki kompetensi menyelesaikan persoalan normatif. Juga, pengetahuan saintifik tidak terpengaruh oleh komitmen nilai yang dianut oleh penelitiannya. Dengan demikian, pengetahuan positif bisa diterima oleh ilmuwan dengan orientasi nilai yang berbeda-beda.

Argumen ini didasarkan pada asumsi pemisahan fakta dan nilai. Positivisme berasumsi bahwa yang faktual dan yang normatif bisa dipisahkan dalam dunia sendiri-sendiri; sains memusatkan perhatian pada urusan faktual sambil berusaha menghindari pengaruh nilai. Norma pokoknya adalah menciptakan pengetahuan yang bebas-nilai.

Lalu, dimana tempat nilai dalam menjelaskan perilaku manusia? Mengingat bahwa urusan normatif berpengaruh besar pada interaksi sosial, apakah ilmuwan tidak perlu memiliki kemampuan menangani persoalan normatif? Positivisme mengakui bahwa nilai memang penting, tetapi nilai yang perlu dipelajari adalah nilai sebagai "fakta sosial". Nilai sebagai "*emotional responses*" (sebagai fakta sosial) inilah yang diakui punya makna dan bisa dipakai untuk menghasilkan pengetahuan.

Namun, bagaimana dengan persoalan nilai yang ada di luar dunia fakta? Dalam hal ini kaum positivis terpecah dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah ilmuwan yang menganut asumsi bahwa 'pengetahuan tidak diakui sebagai pengetahuan sebelum bisa dibuktikan melalui prosedur yang disebut metode saintifik'. Mereka ini berpendapat bahwa persoalan nilai yang diperdebatkan di luar dunia fakta tidak punya makna. Posisi kelompok ini tidak begitu populer dan jumlah pendukungnya semakin merosot. Kelompok kedua juga berpegang pada asumsi bahwa pengetahuan saintifik adalah pengetahuan bebas-nilai yang didasarkan pada fakta dan dibuktikan dengan metode saintifik. Namun, mereka mengakui kemungkinan sumbangan penting dari teorisasi yang tidak berpretensi saintifik dan yang membatasi diri pada penanganan isu-isu normatif. Kelompok kedua ini memperoleh lebih banyak pendukung.

Ringkasnya, sains hanya punya kompetensi dalam analisis tentang kenyataan objektif saja; tentang *das Sein*, bukan *das Sollen*. Ia hanya fokus pada realitas sosial yang secara aktual terjadi, bukan yang semestinya. Seseorang yang mencoba menangani persoalan di luar dunia fakta realitas sosial, berarti juga keluar dari dunia sains. Isu normatif dipandang sebagai persoalan filosofis, karena itu lebih baik diserahkan pada kaum

filosof, bukan ilmuwan sains. Sikap inilah yang membuat ilmuwan positivis dalam studi Hubungan Internasional tidak memperhatikan tujuan penting kegiatan keilmuan, yaitu membantu peningkatan harkat kemanusiaan atau emansipasi manusia.

Kolonialisme Eropa dan dekolonisasi

Pertanyaan menarik mengenai sejarah penyebaran ilmu yang Erosentris ini ke seluruh dunia adalah mekanismenya. Bagaimana penyebaran itu terjadi? Institusi apa yang memungkinkannya? Untuk itu, kita perlu membahas apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa sesudah abad 15. Sejarah menunjukkan bahwa pada 1488 para pelaut Eropa “menemukan” jalur laut melalui pantai selatan Afrika untuk mencapai Asia, dan pada 1492 Columbus telah mendarat di wilayah Amerika. Dengan penemuan jalur laut baru, bangsa-bangsa Eropa, dimulai oleh Portugis dan Spanyol mengembangkan dominasi atas bangsa-bangsa non-Eropa. Ini dikenal sebagai kolonialisme. Dengan institusi ini bangsa-bangsa Barat menjelajahi, menaklukkan, menempati, dan mengeksploitasi wilayah yang sangat luas di dunia. Dengan demikian, kekuatan laut bergeser dari Laut Tengah ke Lautan Atlantik, yaitu ke negara-negara yang waktu itu baru bangkit seperti Portugal, Spanyol, Republik Belanda, Perancis, dan Inggris. Ketika memperluas wilayah geografisnya itu, mereka juga menyebarkan institusi dan kultur Eropa.

Konsep kolonialisme merujuk pada proses dominasi satu kelompok (atau negara dominan) terhadap kelompok lain (sasaran kolonialisme). Dalam hal ilmu pengetahuan, seperti studi Hubungan Internasional, kolonialisme berarti menempatkan negara-negara Barat (Eropa dan Amerika Utara) dan pengetahuan yang dihasilkan sebagai sesuatu yang dominan dan mampu melakukan kolonisasi. Dan proses dominasi ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Akibatnya, studi Hubungan Internasional tidak menganggap penting persoalan kolonialisme, imperialisme, ras, perbudakan, dan penjarahan tanah di wilayah non-Eropa. Hal-hal itu dianggap sebagai konsekuensi dari tata-dunia berdasar kekuasaan. Seolah-olah pengetahuan ini memberi legitimasi, atau paling tidak melakukan pembiaran, terhadap dominasi itu.

Kolonialisme meninggalkan bekas luka yang serius terhadap pengorganisasian sosial, politik, dan ekonomi masyarakat terjajah. Tetapi, perlawanan bangsa-bangsa terjajah itu lama sekali tidak berhasil melepaskan belenggu penjajahan itu. Peluang mereka baru muncul sesudah dua perang besar yang melibatkan negara-negara besar Eropa. Sesudah pertengahan 1940-an, banyak negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika

Latin yang memperoleh kemerdekaan. Proses dekolonisasi di belahan dunia berlangsung dengan cepat dan hampir bersamaan.

Tetapi, yang menarik dalam perjalanan bangsa-bangsa di wilayah bekas jajahan Eropa berpusat pada dekolonisasi politik-legal formal yang tidak segera diikuti dengan kebebasan dalam dimensi lain. Sifat dan kondisi kolonialitas masih melekat dalam kehidupan ekonomi dan kebudayaan dari berbagai bangsa – yang kemudian dikenal sebagai negara-negara Selatan (*the Global South*) itu. Kegiatan produktif dalam bidang ekonomi dan kebudayaan, termasuk produksi pengetahuan, masih sangat jelas sifat Erosentrisnya.

Dalam studi Hubungan Internasional, produksi pengetahuan masih banyak yang melanjutkan penerapan tradisi ontologi, epistemologi, dan metodologi yang sangat Erosentris. Seperti telah diajukan di depan, karena ilmu pengetahuan sangat peka konteks, pengetahuan yang dihasilkan dalam konteks Barat itu tidak mampu menangkap secara utuh pengalaman dan kenyataan yang terjadi di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, apalagi pada masa dekolonisasi itu. Fenomena sosial yang dianggap penting oleh ilmuwan Barat untuk dipelajari dan cara yang mereka anggap tepat untuk mempelajari fenomena itu berbeda dengan yang diperlukan oleh ilmuwan non-Barat. Dengan kata lain, tidak semua yang mereka anggap penting itu relevan dan urgen bagi kondisi-kondisi di negara-negara pasca-kolonial.

Beberapa contoh dari fenomena yang diabaikan oleh ilmuwan konvensional Barat dalam studi Hubungan Internasional adalah: penjarahan lahan, rasisme, perbudakan, genosida, dan kolonialisme. Yaitu, fenomena yang telah menimbulkan tata dunia yang sangat timpang sekarang ini. Dengan memeriksa buku-buku teks yang dipakai untuk mengajarkan studi ini di berbagai perguruan tinggi di dunia, nampak jelas bahwa fenomena yang sangat penting bagi bangsa-bangsa di luar Eropa dan Amerika Utara tidak menjadi perhatian utama ilmuwan Barat. Isu ras, genosida, dan kolonialisme jelas tidak populer bagi mereka.

Mitos Westphalia juga membuat literatur yang Erosentris itu menempatkan negara modern sebagai aktor utama dalam percaturan arena internasional. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, penekanan ini didukung oleh mitos tentang Perjanjian Westphalia yang dianggap melahirkan negara modern dari kebangkrutan negara feodal Eropa. Akibatnya, banyak unit politik independen di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang ada sebelum masa penjajahan Eropa tidak diperhatikan. Beberapa kerajaan di Asia Tenggara yang sejak lama aktif dalam pergaulan internasional tidak mendapat tempat dalam studi Hubungan Internasional berbasis ontologi, epistemologi, dan

metodologi Barat itu. Yang dianggap penting adalah interaksi antar-negara modern, bukan aktor tradisional. Selain itu, muncul hierarki rasial yang mengistimewakan bangsa Barat dan berkulit putih; sementara yang non-Barat dan berkulit gelap direndahkan. Kecenderungan ini juga nampak dalam obsesi studi ini terhadap topik terorisme, humanitarianisme, kedaulatan nasional, penutupan perbatasan, dan persaingan memenangkan kepentingan sendiri.

Dekolonisasi dihadap kolonialitas

Dekolonisasi politik-legal formal sudah dilakukan dengan cukup berhasil untuk menunjukkan bangsa yang terjajah itu sudah bisa berdiri-sama-tinggi dengan bekas penjajahnya. Tetapi, sebagian besar masih mengidap kolonialitas dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam bidang budaya, dekolonisasi dirumuskan sebagai kegiatan membendung dan mendorong kembali kolonialisme dan mentalitas kolonial yang meracuni pendidikan, media massa, kebijakan pemerintahan, dan akal sehat masyarakat. Seperti dikatakan Oelofsen (2015, 130):

bahwa proyek kolonialisme telah berakhir itu sangat berdampak pada negeri dan bangsa yang telah menempuh dekolonialisasi, terutama terkait kesalahpahaman bagaimana proyek kolonial telah memengaruhi secara mendalam negeri dan bangsa ini. Untuk mengatasi warisan-warisan kolonialisme, diperlukan upaya dekolonialisasi lanskap intelektual, dan terutama, dekolonialisasi pemikiran bangsa-bangsa yang sebelumnya terjajah.

Pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kolonial untuk bangsa-bangsa non-Eropa di masa penjajahan dalam praktek merendahkan budaya, pikiran, dan imajinasi kaum pribumi. Penguasa kolonial umumnya menggunakan klaim mengenai pengetahuan, hubungan kekuasaan, dan wacana kultural hegemonik untuk memperkokoh landasan dari kolonisasi di wilayah non-Barat dan untuk membangun serta mempertahankan struktur hierarki rasial. Kebijakan para penjajah Eropa berhasil menanamkan secara mendalam kolonialitas dalam budaya, imajinasi, dan pikiran kaum terjajah itu. Yakni sebetulnya kesadaran yang memandang bahwa Eropa adalah superior, dan karenanya, negeri-negeri Selatan harus menapaki jalan dan menjadikan Eropa sebagai referensi tunggal.

Seorang penulis tentang kolonisasi Afrika mengatakan:

Bentuk kolonisasi paling buruk adalah kolonisasi epistemik (yaitu kolonisasi imajinasi dan pikiran) yang menyusup tersembunyi dalam institusi-institusi dan wacana yang mengatur jalannya kehidupan dunia modern (Ndlovu-Gatsheni, 2013: 63).

Menurut penulis lain:

Kolonialisme memaksakan kontrol produksi sosial kesejahteraan melalui penaklukan militer dan, kemudian, kediktatoran politik. Tetapi, area dominasi terpentingnya adalah

semesta mental orang-orang yang terjajah, yakni kontrol yang dilakukan melalui budaya tentang bagaimana orang melihat diri mereka sendiri dan hubungannya dengan dunia. Kontrol ekonomi dan politik tidak pernah paripurna atau efektif tanpa kontrol mental (Ngugi wa Thiong'o, 1986: 16).

Kolonisasi pikiran bertujuan melenyapkan atau merendahkan praktek bangsa pribumi dalam hal kesusastran, agama, pendidikan, dan sejarah sendiri. Umumnya, kolonisasi pikiran, yang menimbulkan kerusakan lebih parah dari pada kolonisasi sumberdaya material, berlangsung melalui pengajaran epistemologi Barat.

Tentang ini kita akan menggunakan konsep kolonialitas (*coloniality*) untuk menggambarkan bagaimana penguasa kolonial berusaha merendahkan imajinasi dan pikiran bangsa pribumi dengan menganggapnya sebagai tidak beradab. Konsep kolonialitas dipopulerkan sekitar tahun 2000 oleh Anibal Quijano (2000a; 2000b) dan Walter Mignolo (2000).

Mignolo (2005: 6) menggambarkan kolonialitas adalah “sisi gelap” dari modernisasi dan karena itu harus diungkapkan. Sisi gelap ini berfungsi melanjutkan dominasi dan eksploitasi, tetapi selalu digambarkan seolah-olah berakibat baik bagi semua orang. Seperti dikatakan Maldonado-Torres (2007: 243), kolonialitas:

[m]empertahankan kolonialisme. Ini dilakukan terus menerus melalui buku, dalam kriteria performa akademik, pola-pola budaya, kesadaran publik, imaji diri, dalam aspirasi diri, dan dalam aspek pengalaman modern kita. Bisa dikatakan, sebagai subjek-subjek modern kita menghirup nafas kolonialitas sepanjang waktu dan sepanjang hari.

Institusi seperti sekolah, universitas, dan gereja terus mereproduksi kolonialitas. Seruan untuk dokolonialisasi pemikiran dan semesta mental (program universitas, infrastruktur, dan situs produksi pengetahuan) harus terus digaungkan.

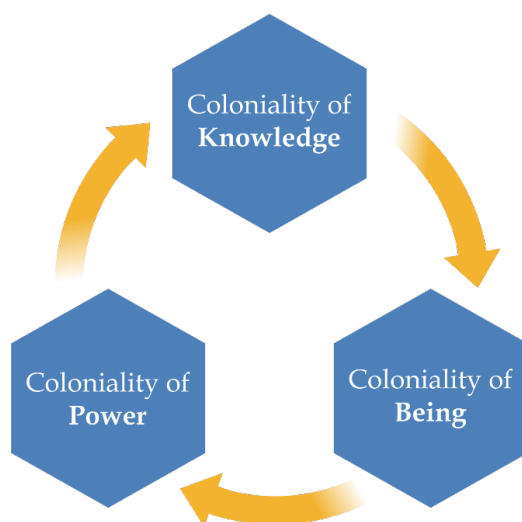
Menurut Quijano (2007), kolonialitas:

... adalah sitasi di mana, meskipun kolonialisasi politik nyata telah dihapuskan, hubungan antara budaya Eropa/Barat/Amerika dan yang lain terus berlangsung melalui cara-cara dominasi kolonial.

Mengingat bahwa situasi kolonialitas masih menyusupi berbagai program pendidikan, sarana dan tempat produksi pengetahuan, dan berbagai institusi seperti sekolah dan universitas, seruan akan dekolonisasi pikiran dan mental masyarakat pasca-kolonial harus terus-menerus dilakukan. Karena inti dari dekolonisasi adalah menghapuskan kolonialisme, para ilmuwan Selatan perlu bergiat mengungkapkan pengalaman bangsa-bangsa mereka dalam menjalani kolonialisme, neo-kolonialisme,

imperialisme, dan keterbelakangan. Tanpa ada upaya ini, kolonisasi di bidang kultural (intelektual, bahasa, estetika) akan berkelanjutan.

Untuk menggambarkan fenomena kolonialitas yang dialami oleh bangsa-bangsa bekas jajahan ini, Walter Mignolo (dibahas dalam Grosfoguel, 2007: 203-246) memperkenalkan tiga konsep terkait dengan fenomena kolonialitas, yaitu: **(1)** kolonialitas kekuasaan; **(2)** kolonialitas pengetahuan; dan **(3)** kolonialitas keberadaan.



Gambar. Model kolonialitas oleh Grosfoguel (2007: 203-246).

Kolonialitas Kekuasaan

Quijano (2000a) mendefinisikan konsep kolonialitas kekuasaan (*coloniality of power*) sebagai “hierarki rasial dan epistemologis yang melekat dalam hierarki struktural seperti kapitalisme global, yang terus menjadi faktor penting setelah periode kolonisasi”. Konsep ini membantu kita memahami bagaimana tatanan politik-global masa kini dikonstruksi, apa saja yang membentuk tatanan ini, dan bagaimana ia disusun sehingga menjadi struktur kekuasaan modern yang secara rasial hierarkis, Ero-Amerika sentris, patriarkal, kapitalis, hegemonik, dan asimetris.

Konsep kolonialitas kekuasaan dapat dipakai untuk memahami bagaimana Barat menggunakan modernisasi untuk mengkolonisasi kesadaran dan pikiran bangsa-bangsa pribumi dalam upaya membangun hierarki kekuasaan yang Erosentris. Dalam *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*, Miranda Fricker (2007) menunjukkan bahwa konsep kekuasaan sosial (*social power*) (yang didefinisikannya

sebagai “kapasitas yang tersituasikan secara sosial untuk mengontrol tindakan yang lain”) bisa digunakan untuk menciptakan atau memelihara suatu tatanan sosial tertentu. Umumnya, kekuasaan sosial dipakai untuk membungkam “sang Liyan”. Kepentingan utama kekuasaan sosial itu adalah membentuk “*identity power*”, yang diungkapkan melalui “*identity prejudices*” – yaitu prasangka mengenai identitas kita sendiri dan identitas “sang Liyan”.

Kolonialitas Pengetahuan

Konsep kolonialitas pengetahuan menggambarkan dampak kolonisasi di berbagai bidang produksi pengetahuan. Lembaga-lembaga pembelajaran masih terus mengajarkan pengetahuan model Barat. Tujuan dari pengajaran pemikiran, imajinasi, dan pengetahuan Barat dan Eropa-sentris di kalangan bangsa pribumi adalah menghapus keberadaan mereka dan menempatkannya sebagai “sesuatu di wilayah *the Otherness*”. Konsep kolonialitas pengetahuan memaksa ilmuwan untuk memahami bagaimana dan mengapa sistem pengetahuan yang lain (non-Barat), seperti pengetahuan pribumi, diabaikan, dan disingkirkan (Grosfoguel 2013). Seorang ilmuwan menggambarkan fenomena itu sebagai berikut:

Penjajah tidak hanya mendistorsi sejarah bangsa-bangsa terjajah, membantai sistem pengetahuan mereka dan menghancurkan kepercayaan diri dan stamina emosional mereka untuk bisa hidup tanpa dominasi kolonial. Namun, ia juga terus menciptakan pengerdilan dan pelabelan terhadap bangsa-bangsa terjajah – di antaranya sebagai bangsa malas, pemabuk, terbelakang, amok, jorok, bodoh, bebal, malang, dan terkutuk – yang memerlukan intervensi penjajah untuk menyelamatkan sang terjajah dari berbagai “kekurangan” dan “defisit” yang membelenggu dirinya dan nasibnya (Mpofu, 2013: 109–110).

Ketika para pendidik Eropa datang ke tanah jajahan, mereka sudah membawa prasangka tentang bangsa pribumi yang dipandangnya sebagai makhluk yang tidak beradab sehingga perlu diajari peradaban melalui pengajaran pengetahuan Barat. Berbagai institusi pembelajaran diterapkan untuk memperkenalkan pengetahuan yang Erosentris. Menurut Foucault (2013) ada dua jenis pengetahuan yang mendominasi lembaga-lembaga ini: pengetahuan yang terorganisasi dalam disiplin, bidang keilmuan atau area (*connaissance*) dan pengetahuan umum, yang menciptakan kondisi bagi objek pengetahuan untuk diambil sebagai bahan pelajaran oleh suatu disiplin (*savoir*).

Kondisi ini juga menjadi perhatian Fanon dalam bukunya berjudul *Black Skin, White*

Masks (2008: 14). Dalam buku itu Fanon menjelaskan bahwa sangat penting “untuk membebaskan si kulit hitam dari belenggu persoalan yang berkembang dalam situasi kolonial”. Dengan kata lain, Fanon percaya bahwa bangsa pribumi harus bisa mengatasi “*inferiority and superiority complexes*” yang tersembunyi dalam sistem pengetahuan Barat. Kolonialisme jelas membuat bangsa pribumi menderita *inferiority complex*, yang secara psikologis terus membelenggu mereka.

Selanjutnya, konsep kolonialitas pengetahuan mengajukan pertanyaan epistemologis yang terkait dengan: **1)** politik pembentukan pengetahuan; **2)** pertanyaan tentang siapa yang menumbuhkan pengetahuan apa dan untuk tujuan apa; **3)** pertanyaan tentang relevansi (atau irrelevansi) suatu pengetahuan; dan **4)** bagaimana suatu pengetahuan memberdayakan atau melemahkan komunitas atau bangsa (Ake 1979). Konsep kolonialitas pengetahuan bisa membantu kita memahami dan mengungkapkan pembungkaman epistemik (*epistemic silences*), konspirasi, dan *epistemic violence* yang tersembunyi di dalam epistemologi Erosentris.

Adapun dalam hal studi Hubungan Internasional, kolonialitas pengetahuan terbentuk melalui pemahaman mengenai ruang dan waktu berdasar konsepsi Barat tentang modernitas. Berdasarkan logika biner (*binary*) Aristoteles, ilmu yang dikembangkan di Barat ini memandang Barat sebagai “superior”, maju, “*developed*”; sedangkan Non-Barat sebagai “inferior”, terbelakang, “*under-developed*”. Barat yang berhasil melakukan revolusi industri “menemukan” bangsa-bangsa non-Eropa yang terbelakang dan lemah. Cara berpikir biner atau dikotomik ini mendominasi teorisasi tentang modernisasi dan pembangunan ekonomi.

Dalam “*geo-cultural division of knowledge production*”, “Barat” ditempatkan sebagai “yang berpengetahuan” dan “yang beradab”; sedangkan “non-Barat” yang sebaliknya. Barat adalah rujukan bagi non-Barat yang ingin maju. Dengan cara ini terbentuklah hegemoni Barat atas yang lain berdasar dikotomi beradab vs barbar, modern vs tradisional, maju vs terbelakang.

Bidang studi Hubungan Internasional yang dikembangkan di Barat mereproduksi dikotomi ini dan memperlakukan bangsa-bangsa non-Barat sebagai inferior dan masalah yang mereka hadapi tidak dianggap penting. Inilah yang memunculkan pengertian Erosentrisme Ilmu Hubungan Internasional dan mendorong munculnya untuk mempersoalkan “kolonialitas studi Hubungan Internasional”.

Berdasar ukuran Claude Ake tentang kolonialitas (Ake, 1979), sudah jelas bahwa studi Hubungan Internasional selama ini dikembangkan untuk memproduksi pengetahuan yang lebih relevan dengan dan lebih mendukung kepentingan Barat.

Kolonialitas Keberadaan

Konsep “*coloniality of Being*” sudah diperkenalkan dalam tulisan Walter Mignolo tahun 1995. Konsep ini muncul sesudah ilmuwan yang mempelajari kolonialisme/dekolonialisme menyimpulkan bahwa hubungan kekuasaan kolonial tidak hanya meninggalkan bekas yang sulit dihapus dalam hal kekuasaan, pengetahuan, dan ekonomi, tetapi juga dalam hal pemahaman mengenai keberadaan orang. Mignolo (2007: 242) menegaskan bahwa konsep ini merupakan tanggapan terhadap “kebutuhan untuk mentematisasi pertanyaan tentang efek kolonialitas dalam pengalaman hidup tidak hanya dalam pikiran”. Konsep itu menyentuh persoalan ontologi manusia, pemulihan atas kebanggaan-diri yang dihinakan, dan subjektivitas yang berdaulat”.

Mignolo (2007: 256) meringkas pengertian kolonialitas Keberadaan sebagai berikut:

Kolonialitas Keberadaan tampak dalam proyek-proyek sejarah dan gagasan-gagasan peradaban yang membawa serta ragam proyek kolonial yang diinspirasi atau disahkan oleh gagasan tentang ras. Kolonialitas keberadaan, oleh karenanya, berlangsung bersamaan dengan pembentukan ragam ekspresi dan dimensi yang berbasis warna kulit. Ia menjadi nyata dalam subjek-subjek tapal batas, yang menandai, sebagaimana sebelumnya, batas Keberadaan, yakni, titik di mana Keberadaan mendistorsi makna dan dan bukti sampai pada tingkat dehumanisasi. Kolonialitas Keberadaan membentuk perbedaan ontologi kolonial, menggunakan serangkaian karakter eksistensial dasar dan realitas-realitas simbolik.

Konsep kolonialitas keberadaan ini penting karena membantu kita menelaah bagaimana Barat menggambarkan kemanusiaan bagi bangsa pribumi yang hasilnya adalah objektifikasi (*objectification*), pembendaan (*thing-ification*), dan komodifikasi (*commodification*) terhadap orang-orang ini. Bangsa pribumi adalah objek (tidak bisa jadi subjek dengan “*agency*”); mereka adalah “*things*”; dan mereka adalah komoditi yang bisa dipertukarkan.

Konsep kolonialitas ini membantu kita untuk memahami bahwa studi Hubungan Internasional di kawasan dunia Selatan lahir sebagai disiplin keilmuan yang mengembangkan “kolonialitas pengetahuan” (*coloniality of knowledge*). Anibal Quijano menjelaskan konsep ini sebagai “kekerasan epistemik yang dilakukan melalui perjumpaan dengan sang Liyan.” Jenis ini menghasilkan fenomena yang oleh Boaventura de Sousa Santos disebut sebagai ‘*epistemicide*’. Yaitu praktek ilmuwan Hubungan Internasional arus utama yang mengabaikan dan menolak keberadaan pengetahuan non-Barat. Pengetahuan non-Barat dianggap tidak ada, disangkal atau

dibungkam. Bahkan, pengetahuan yang sudah berkembang di masyarakat non-Barat diklaim dan dipatenkan hasil penemuan ilmuwan Barat. Praktek yang didasarkan pada klaim rasionalitas Barat dianggap unggul dibanding dengan non-Barat. Pengutamaan epistemologi Barat ini menimbulkan dikotomisasi rasional vs rasional, modern vs tradisional, progresif vs terbelakang (Fonseca, 2019).

Dalam perkembangannya, kecenderungan ini semakin parah ketika studi Hubungan Internasional bisa dimanfaatkan oleh negara besar untuk mencapai tujuan memenangkan kompetisi strategis internasional, yaitu Perang Dingin. Sebagai produsen utama pengetahuan Hubungan Internasional, blok Barat (yang dipimpin oleh Amerika Serikat) memakainya untuk mengembangkan lingkungan pengaruh bersaing dengan blok Timur (yang dipimpin oleh Uni Soviet). Geopolitik bertemu dengan studi Hubungan Internasional.

Geopolitik dan *Military-Intellectual Complex*

Studi Hubungan Internasional diproduksi pertama kali di kalangan ilmuwan sosial Eropa dan kemudian Amerika Serikat dengan tujuan khas: mengembangkan hubungan damai di antara bangsa-bangsa, dengan tekanan utama pada peran negara-negara besar. Dalam perkembangannya, ilmu ini dianggap bermanfaat untuk mengelola hubungan antar-bangsa dan dikembangkan di berbagai perguruan tinggi di wilayah Atlantik Utara sebagai disiplin tersendiri.

Perkembangan geopolitik sesudah berakhirnya Perang Dunia II dan berawalnya Perang Dingin antara “Blok Barat” vs “Blok Timur”, memberi peluang baru pada para pemimpin negara besar “Blok Barat”. Yaitu rekayasa keilmuan sosial demi mempertahankan pengaruh negara-negara “Blok Barat”. Produksi pengetahuan tentang bagaimana membangun ekonomi negara-negara baru merdeka, dengan berbagai dimensi sosial dan politiknya, bisa dimanfaatkan untuk menjalin kembali hubungan yang sempat terganggu antara negara-negara Asia dan Afrika dengan bekas penjajahnya di Eropa dan Amerika Utara. Inilah latar belakang kelahiran ilmu tentang modernisasi dan pembangunan yang terutama disponsori oleh pemerintah dan pengusaha Amerika Serikat sejak 1940-an.

Sebagai bagian dari proyek modernisasi, studi Hubungan Internasional memperoleh fungsi penting, yaitu mengembangkan hubungan baik dengan negara-negara baru merdeka dalam rangka memenangkan Blok Barat dalam persaingan dengan Blok Timur. Penyebaran studi Hubungan Internasional bisa dimanfaatkan untuk mempertahankan posisi Barat dalam arena internasional. Dekolonisasi politik, yaitu berakhirnya penjajahan Barat di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin, diikuti dengan neo-kolonialisme berwujud penyebaran ilmu sosial, berkedok modernisasi sosial-ekonomi, termasuk studi Hubungan Internasional.

Military-Intellectual Complex

Konsep ini menggambarkan kerjasama antara ilmuwan sosial dengan pejabat pemerintah. Hubungan simbiotik ini bukan hanya dalam wujud dana penelitian yang sangat diperlukan oleh perguruan tinggi, tetapi juga pelibatan para profesornya dalam pengembangan keilmuan yang relevan bagi pengembangan kebijakan publik.

Dalam kasus studi Hubungan Internasional, kerjasama antara akademisi perguruan tinggi dengan pejabat perencanaan keamanan nasional Amerika Serikat, paling tidak sejak 1947, sering dilakukan dalam perumusan politik luar negeri. Kerjasama ini juga mendapat dukungan kuat dari tiga lembaga filantropi besar seperti *Rockefeller Foundation*, *Ford Foundation*, dan *Carnegie Endowment*, serta perusahaan penelitian seperti *RAND Corporation*. Sehingga muncullah kerjasama segitiga yang berpengaruh besar terhadap pengembangan ilmu sosial, termasuk Studi Hubungan Internasional.

Kerjasama segitiga ini sangat penting bagi perkembangan studi Hubungan Internasional. Epistemologi dan metodologi yang berkembang dalam studi Hubungan Internasional (yang oleh Stanley Hoffman disebut sebagai "*American Social Science*") mencerminkan kepentingan negara adidaya itu. Yang dianggap penting bagi kepentingan negara besar itu menjadi bahan studi penting dan masuk dalam kurikulum pengajaran di perguruan tinggi. Metodologi yang dianggap efektif untuk menjawab pertanyaan praktis kebijakan publik mendapat tempat istimewa. Dalam ilmu sosial, ini termasuk metodologi "*behavioral science*".

Dengan kata lain, produksi pengetahuan mengenai hubungan internasional di Amerika Serikat, terutama yang arus utama, dan diseminasinya ke berbagai negara, bersesuaian dengan kepentingan pemerintah dan bisnis besar negara itu.

Menurut Robin, Military-Intellectual complex ini menjalankan fungsi sebagai "*para penjaga status quo, yang dengan sungguh-sungguh memproduksi pengetahuan yang digunakan untuk menekan kemungkinan terjadinya revolusi politik dan kekacauan*" (Robin, 2003: 236). Bagi para pengkritiknya, karya keilmuan mereka yang paling penting, yaitu *behavioral science* "*dikonstruksi untuk melegitimasi kebijakan luar negeri imperial dan intervensionis di bawah klaim ilmu "bebas nilai" dan pencarian pengetahuan tak berpihak dengan memperlihatkan bentuk bukti-bukti lain*" (Robin, 2003: 236).

Sebenarnya, karya mereka itu adalah "*ethnocentric projection of American values*" – proyeksi etnosentris nilai-nilai Amerika.

Berbagai pernyataan dan argumen ini menunjukkan betapa penting bagi ilmuwan non-Barat, termasuk Indonesia, untuk memahami sejarah keilmuan ini dan berusaha membebaskan diri dari dominasi Barat dalam produksi pengetahuan Hubungan Internasional. Seperti halnya bangsa Indonesia telah melakukan dekolonisasi dalam bidang politik demi kebebasan dalam menentukan sendiri, dekolonisasi ilmu pengetahuan juga perlu dilakukan, terutama studi Hubungan Internasional, untuk menjamin manfaat ilmu pengetahuan bagi pencapaian tujuan bernegara.

Dekolonisasi pengetahuan

Apa yang dimaksud dengan dekolonisasi ilmu pengetahuan? Menurut Mignolo:

Dekolonisasi ilmu sosial dan filsafat artinya memproduksi, mengubah, dan mendiseminasikan pengetahuan yang tidak tergantung pada epistemologi modernitas Atlantik Utara – norma-norma disiplin dan problem-problem Atlantik Utara – melainkan untuk merespon kebutuhan perbedaan pengalaman kolonial (Mignolo, 2008, p. 247).

De Sousa Santos (dikutip dalam Zondi, : 1) mengatakan:

Bermula dari asumsi bahwa perbedaan kultural dan epistemologi itu saling melekat, kami...menunjukkan bahwa upaya untuk emansipasi sosial didasarkan pada penggantian model 'pengetahuan ilmiah monokultur' dengan sebuah 'ekologi pengetahuan'. Ekologi pengetahuan...memberikan 'kesetaraan kesempatan pada ragam pengetahuan untuk terlibat dalam perdebatan epistemologi yang lebih luas yang ditujukan untuk memaksimalkan kontribusinya dan untuk membangun masyarakat yang lebih demokratis dan adil dalam kerangka dekolonisasi pengetahuan dan kekuasaan.

Konsep kolonialisme merujuk pada proses dominasi satu kelompok (atau negara) terhadap kelompok lain (sasaran kolonialisme). Dalam studi Hubungan Internasional negara-negara Barat (Eropa dan Amerika Utara) ditempatkan sebagai kelompok dominan yang mampu melakukan kolonisasi. Dan proses dominasi dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Dalam kondisi itu, Studi Hubungan Internasional tidak menganggap penting persoalan kolonialisme, imperialisme, ras, perbudakan, dan penjarahan tanah di wilayah non-Eropa. Hal-hal itu dianggap merupakan konsekuensi dari tata dunia berdasar kekuasaan.

Seperti telah disampaikan, studi Hubungan Internasional nampak tidak tertarik membahas dominasi bangsa-bangsa Atlantik Utara terhadap bangsa-bangsa lain. Secara metodologis, “tradisi-tradisi metodologis arus utama dibangun atas penolakan terhadap cara-cara alternatif memandang realitas yang dianggap rendah, tidak ilmiah, menyimpang, mitos, dan sebagainya” (Ake,1979:125). Metodologi dominan dianggap satu-satunya cara mempelajari studi Hubungan Internasional, tidak ada acara lain.

Begitulah, secara substantif maupun metodologis, studi Hubungan Internasional arus utama menerapkan perspektif yang sangat terbatas, yaitu Erosentrisme.

Dekolonisasi adalah proses mengungkap sejarah penindasan itu secara sistematis dengan tujuan mengoreksi ketimpangan dan mengedepankan keadilan dalam hubungan antar-bangsa.

Dekolonisasi sebuah naratif, setidaknya, membongkar peran kolonialisme dalam konstruksi narasi dan melalui kesadaran ini dekolonisasi memperkaya perkembangan narasi dengan cara-cara yang tak-terkolonisasi (Khrisna, 2012).

Dengan pemikiran di atas, upaya dekolonialisasi ilmu pengetahuan didasarkan pada asumsi bahwa:

- keanekaragaman budaya mengharuskan keanekaragaman epistemologi. Pengetahuan dan cara menghasilkan pengetahuan tidak tunggal, tetapi terdapat berbagai jalan memproduksi pengetahuan, tergantung pada konteks sosial-geografisnya;
- pengetahuan bersifat emansipatoris, bertujuan memberi kebebasan pada manusia untuk mengaktualisasikan dirinya;
- akses ke pengetahuan harus merata untuk semua orang.

Strategi dekolonisasi studi Hubungan Internasional

Dekolonisasi studi Hubungan Internasional, menurut Branwen Gruffydd Jones (2006: 7-9), adalah “mempertanyakan fondasi-fondasi politik, ontologis, dan historis atas disiplin ini, mempertanyakan bagaimana disiplin ini terbentuk seperti yang ada sekarang dan bagaimana ia menciptakan dunia politik dan sosial”.

Terdapat dua jalan untuk melakukan dekolonisasi studi Hubungan Internasional, yang keduanya mengarah ke pluralisasi atau multiversalisasi.

Strategi 1: Memikirkan kembali asal-usul tatanan dunia modern

Bagaimana sejarah kemunculan gagasan mengenai “internasional”? Menurut Inayatullah dan Blaney (2004) konseptualisasi mengenai fenomena “internasional” dalam pemikiran orang-orang Eropa muncul di masa yang dikenal sebagai “abad 16 yang panjang” – suatu kurun yang dimulai pada 1492, ketika Eropa “menemukan” benua Amerika. Inayatullah dan Blaney menunjukkan bahwa gagasan mengenai kedaulatan dan “*just war*” atau perang yang dianggap sah (dua konsep dasar dalam studi Hubungan Internasional) dirumuskan berdasarkan pengertian mengenai dunia pada waktu itu dan dimaksudkan untuk berlaku secara universal tanpa memperhatikan bahwa gagasan itu muncul dari pengalaman masyarakat di Eropa.

Mereka mengajukan argumen bahwa penemuan intelektual benua Amerika berperan sentral dalam merumuskan peradaban Eropa, melalui perbandingan dengan tanah jajahan itu. Dalam perbandingan itu, Eropa mengidentifikasi diri sebagai masyarakat beradab, sedangkan “sang Liyan” (*the Other*) digambarkan sebagai “barbar” atau tidak-beradab. Berdasar pembedaan inilah rezim pengetahuan atau episteme Barat dirumuskan (Inayatullah dan Blaney 2004: 47-91).

Yang dipakai sebagai bukti superioritas Eropa adalah keberhasilan para pemimpinnya melahirkan Perjanjian Westphalia tahun 1648, yang melandasi pelembagaan kehidupan politik modern, yaitu negara-bangsa. Keberhasilan ini dianggap sebagai kemajuan Eropa dan negara-bangsa dijadikan sebagai model yang “alamiah” dan patut ditiru oleh bangsa-bangsa lain. Kejadian ini dipakai sebagai dasar untuk konseptualisasi studi Hubungan Internasional yang menempatkan negara-bangsa

sebagai aktor utama. Hanya negara-bangsa yang secara sah menjalankan hubungan internasional. Di sini, Internasional berarti hubungan antar negara-bangsa.

Inayatullah dan Blaney menunjukkan bahwa perumusan konsep “internasional” di kalangan para intelektual Eropa, yang menghasilkan gagasan mengenai hubungan internasional yang diberlakukan secara universal, didasarkan pada praktek kolonialisme di benua Amerika dalam. Pengalaman kolonialisme di benua Amerika itu merupakan material bagi para intelektual Eropa untuk merumuskan kegiatan keilmuan yang pada abad 20 muncul sebagai studi Hubungan Internasional. Mereka memperhatikan dinamika di wilayah kolonial itu, dengan perspektif Eropa, dan memunculkan konseptualisasi dan teorisasi yang kemudian ditubuhkan dalam studi Hubungan Internasional.

Sebaliknya, kegiatan keilmuan di Amerika Latin mengenai kolonialitas kekuasaan (*the coloniality of power*) bertujuan memahami gerakan intelektual ini dari perspektif pribumi Amerika, terutama perspektif bangsa terjajah di bagian selatan. Pada dasawarsa 1960-an, muncul studi mengenai hubungan antara Eropa (Metropolis) dengan Amerika Latin (Periphery) yang timpang, yang dikenal sebagai “*Dependencia*”. Tahun 1992, melanjutkan tradisi ini, muncul karya dengan perspektif kolonialitas oleh warga Peru, Anibal Quijano, dan warga Amerika Serikat, Immanuel Wallerstein, yang mengembangkan pemikiran mengenai benua mereka (“*Americanity as a Concept*”). Kesimpulan mereka menunjukkan inti pendekatan yang dipakai:

Sistem dunia modern lahir pada abad enam belas yang panjang. Amerika sebagai konstruksi geososial lahir pada abad enam belas yang panjang. Pembentukan entitas geososial ini, Amerika, merupakan tindakan yang membentuk sistem dunia modern. Amerika tidak dimasukkan ke dalam dunia ekonomi kapitalis yang sudah ada. Tidak mungkin akan ada sebuah dunia ekonomi kapitalis tanpa Amerika (Quijano dan Wallerstein, 1992: 549).

Walaupun tekanan mereka pada tahap ini diletakkan pada saling-keterkaitan antara modernitas dan kapitalisme, fokus mereka adalah pada peran benua Amerika sebagai lokasi sentral dan sebagai gagasan utama yang melahirkan modernitas. Dan ini memungkinkan Quijano untuk mengembangkan konsep kolonialitas dalam artikel pentingnya berjudul “Coloniality of Power, Eurocentrism and Latin America” (2000). Berdasar pengalaman Andes, Quijano menggambarkan proses munculnya modernitas berbarengan dengan kolonialitas. Modernitas memuat sisi gelap, yaitu kolonialitas, berupa dominasi, kekerasan, dan penindasan. Penindasan ini bukan hanya pada dimensi material-fisik, tetapi yang lebih parah adalah pada dimensi kognitif dan kesadaran, terutama cara pribumi berpengetahuan dan bertindak dalam kehidupan.

Dampak kolonialitas nampak sangat jelas di mata kaum pribumi tanah jajahan. Mereka setiap hari mengalami penindasan, pelecehan, penghinaan, dan indoktrinasi dari penjajah. Tetapi, para penguasa kolonial tidak melihat itu. Yang mereka lihat adalah masyarakat pribumi yang terbelakang dan tugas mereka adalah menghadirkan kemajuan di tanah jajahan, seperti digambarkan dalam konsep modernitas.

Bagi Quijano, hubungan timbal-balik antara kolonialitas dan modernitas, yang muncul akibat interaksi antara bangsa-bangsa Eropa, Afrika, dan Pribumi benua Amerika, itulah yang membentuk tatanan dunia masa kini, yang diwarnai oleh hierarki geopolitik “alamiah”nya. Dengan demikian, kolonialitas bukanlah kata sifat. Konsep itu tidak menggambarkan keadaan kolonialisme, tetapi kolonialitas adalah wujud dari kolonialisme, seperti halnya “modernitas” adalah wujud dari kehidupan masyarakat modern (Mignolo 2005: 6).

Dalam perspektif kolonialitas kekuasaan, dominasi kolonial bukan hanya berupa kontrol dan eksploitasi fisik, tetapi juga dominasi epistemologi. Pendekatan kaum Pribumi dan Afrika di benua Amerika untuk memahami dunia, cara mereka merekam dan mengajarkan pengetahuan mengenai dunia, dan berbagai asumsi mereka mengenai makna sebagai makhluk manusia, semuanya menjadi sasaran dominasi Barat. Ini yang disebut *epistemicide*, yaitu pembunuhan, pembungkaman, penghapusan, dan pengerdilan sebuah sistem berpengetahuan.

Strategi 2: Menggeser pusat perhatian studi Hubungan Internasional

Strategi intelektual kedua adalah menyingkirkan asumsi tentang “internasional” dengan mengganti yang semua dianggap sebagai unsur pokok (seperti kedaulatan negara) atau aktor utama (seperti Perserikatan Bangsa-bangsa) sebagai fokus analisis studi Hubungan Internasional. Beberapa ilmuwan seperti Tétreault dan Lipschutz (2009), memulai pemahaman mengenai fenomena internasional “*as if people mattered*”. Studi Hubungan Internasional, menurut mereka, mesti dimulai dengan membahas masalah konkret yang dihadapi manusia, seperti kekerasan dan kemiskinan, tindak politik dan kultural, dalam ruang yang dibatasi oleh batas negara-bangsa. Studi Hubungan Internasional harus bisa mengajak pembelajar membayangkan kemungkinan munculnya komunitas politik yang dibatasi oleh politik luar dan norma-norma organisasi internasional.

Strategi “*decentering*” ini berpotensi mendukung dekolonisasi studi Hubungan Internasional karena untuk mempelajari fenomena Hubungan Internasional tidak

perlu mulai dengan teori akademik, tetapi dengan kehidupan manusia yang mungkin berserak, tidak beraturan, tidak selalu logis, dan sangat kaya informasi. Ilmuwan lain, seperti Meghana Nayak dan Eric Selbin melangkah lebih jauh dengan menggabungkan perspektif teoritik (yang mengkritik rezim teoritik dominan dalam studi Hubungan Internasional) dengan strategi menggeser perhatian HI dan membayangkan kembali politik internasional dari berbagai sudut pandang kultural, geopolitik, dan epistemologis yang berbeda (2010). Dua ilmuwan ini berusaha “mengganggu, tak memutlakan, dan mengkotakkan HI”, dengan maksud “mempolitisasi dunia, apa yang kita lakukan untuk membuat dunia bertahan dan apa efek-efek tindakan kita” (Nayak dan Selbin, 2010: 10). Ini bukan hanya berperan mempermudah pengenalan norma-norma kultural dan perspektif baru, tetapi juga menyuguhkan wawasan kritis mengenai “inti persoalan” dari lokasi yang semula diabaikan dalam peta geopolitik.

Memikirkan kembali pengertian konsep “Internasional” dan “*decentering*” Hubungan Internasional pada dasarnya sama-sama mendorong pluralisasi dan multiversalisasi studi ini. Dekolonisasi studi Hubungan Internasional, dilakukan melalui pluralisasi aktor dan isu yang dipelajari. Demi pengembangan studi Hubungan Internasional yang bermanfaat bagi bangsa-bangsa *the Global South*, kita mesti menyadari kelemahan epistemologi dan metodologi yang mengandalkan pengalaman Eropa dan Amerika Utara. Kita perlu membuka diri terhadap kemungkinan pluralitas atau bahkan multi-pluralitas perspektif untuk mempelajari fenomena hubungan internasional.

Pengetahuan sebagai sarana emansipasi manusia

Semakin banyak ilmuwan Hubungan Internasional keberatan dengan posisi keilmuan positivis, terutama karena logika internalnya tidak mendorong berkembangnya ilmu Hubungan Internasional yang berorientasi pada emansipasi manusia. Ilmuwan Hubungan Internasional positivis lebih banyak mengarahkan perhatian pada persoalan epistemologi, yaitu mencari cara terbaik mempelajari politik dunia namun kurang memperhatikan persoalan ontologi, yang berkenaan dengan asumsi-asumsi yang dianut manusia mengenai hakekat dunia.

Sebagai imbalan, para pengkritik positivisme itu mengembangkan teorisasi Hubungan Internasional yang emansipatoris. Upaya ini dimungkinkan oleh kesadaran bahwa produksi pengetahuan selalu terkait kekuasaan. Robert Cox (1981: 128) menegaskan bahwa “teori selalu untuk melayani seseorang dan suatu tujuan”. Lebih lanjut ia membedakan teori Hubungan Internasional positivis dan kritis dalam diktum “*theory of vs theory for*”. Meskipun terdapat banyak varian, model teori kritis ini memiliki tiga ciri pokok berikut:

1. ***Refleksivitas teoritik.*** Teorisasi yang bertujuan memberi sumbangan yang berarti ke arah emansipasi manusia tidak bisa hanya membatasi pada penelaahan empiris, sepenting apapun fakta empiris itu. Teori emansipatoris harus juga melibatkan proses refleksi teoritik atas proses berteori itu sendiri, termasuk mempertanyakan asumsi-asumsi normatif, bahkan ideologi, yang mendasarinya.
2. ***Perhatian pada peran kreatif kesadaran manusia.*** Kesadaran manusia tidak hanya berperan dalam proses memproduksi pengetahuan, tetapi juga dalam pembentukan dan transformasi mode kehidupan sosial dan politik. Fokus utamanya adalah pada kekuatan konstitutif dan non-reduktif kesadaran manusia dalam interaksi dialektis dengan lingkungan alam-sosialnya.
3. ***Mengembangkan kritik sosial untuk mendukung politik praktis yang berorientasi pada transformasi sosial.*** Teori emansipatoris berusaha mendorong proses pendidikan dan “*conscientization*” di kalangan mereka yang kurang diperhatikan oleh aturan sosial dan politik yang berlaku, sehingga memungkinkan mereka memperoleh daya untuk melakukan perubahan sosial.

Argumen pokok yang diajukan para ilmuwan anti-positivisme itu adalah bahwa dominasi logika positivistik itulah yang telah menghambat pengembangan teori kritis dalam studi Hubungan Internasional. Kalau ilmu Hubungan Internasional ingin memberi sumbangan terhadap emansipasi manusia, maka tiga unsur pembentuk teori kritis perlu dikembangkan di dalamnya. Berikut ini kita akan membahas unsur-unsur itu satu-persatu.

Yang **pertama** adalah reflektivitas teoritik. Pembahasan tentang konsep ini perlu dikaitkan dengan asas pertama positivisme, yaitu kebenaran sebagai kesesuaian antara teori dan fakta. Reflektivitas teoritik didefinisikan sebagai “refleksi teoritik tentang proses berteori itu sendiri”. Dalam definisi itu termuat tiga unsur inti:

1. kesadaran ilmuwan (teoritis) tentang premis yang melandasi teorisasinya;
2. pengakuan tentang dimensi normatif-politik yang secara inheren terkandung dalam paradigma dan tradisi ‘normal-science’ yang didukungnya;
3. penegasan bahwa walaupun tidak ada bahasa observasi yang netral, penilaian dan perbandingan mutu antara satu paradigma dengan paradigma lainnya bisa dilakukan.

Kesadaran bahwa teorisasi yang dilakukan setiap ilmuwan pasti didasarkan pada suatu asumsi atau premis (unsur pertama reflektivitas teoritik) dan pengakuan akan adanya muatan normatif-politik dalam setiap paradigma (unsur kedua) ini bertentangan dengan prinsip dasar positivisme tentang “kebenaran sebagai kesesuaian antara teori dan fakta”. Seperti diuraikan di atas, berdasar asas ini, suatu eksplanasi teoritik hanya akan dianggap benar kalau mencerminkan kenyataan empiris, yaitu sesuai dengan fakta. Juga seperti diuraikan di atas, asas ini bertumpu pada asumsi bahwa subjek peneliti bisa dipisahkan dari objek penelitiannya. Dengan kata lain, asas “kebenaran sebagai kesesuaian antara teori dengan fakta” berasumsi bahwa melalui penerapan desain dan teknik penelitian yang benar, pengaruh peneliti terhadap sasaran penelitiannya bisa dihilangkan dan yang dihasilkan adalah gambaran tentang dunia seperti apa adanya.

Asumsi positivis ini lemah karena pada kenyataannya, dalam ilmu sosial, peneliti dan objek penelitian tidak bisa dipisahkan. Juga komunitas peneliti itu berperan aktif dan penting dalam menentukan pengetahuan apa yang perlu dihasilkan dan hasil penelitian mana yang perlu dinilai tinggi. Artinya, komunitas peneliti itu sangat berkaitan dengan objek penelitiannya. Komunitas itulah yang menentukan patokan tentang yang disebut “*reliable knowledge*”, yang juga dipakai untuk menentukan

persoalan sosial mana yang perlu diperhatikan dan mana yang tidak perlu diperhatikan. Akibatnya, banyak persoalan terabaikan karena tidak memenuhi patokan itu, walaupun mungkin sangat penting.

Sebaliknya, orientasi refleksi teoritik menolak anggapan tentang adanya patokan objektif yang tidak terpengaruh oleh pikiran dan tindakan manusia. Seperti halnya filsuf ilmu sosial pasca-positivisme, pendukung orientasi ini menunjukkan bahwa subjek peneliti tidak pernah bisa dipisahkan dari objek penelitiannya seperti yang diasumsikan oleh positivisme. Patokan objektif yang diajukan kaum positivis untuk menilai argumen-argumen ilmiah itu sebenarnya juga buatan manusia, bukan alamiah. Patokan itu dibuat berdasar konvensi yang diterapkan oleh para anggota komunitas tertentu.

Sampai disini kita menyentuh soal muatan normatif politik dalam penelitian keilmuan. Dalam hal ini kita perlu memperhatikan bahwa ketika seorang ilmuwan mengembangkan suatu teori, ia sebenarnya sedang berusaha menanggapi masalah-masalah tertentu, menanggulangi situasi tertentu, dan memenuhi keperluan dan kepentingan tertentu. Dengan kata lain, ada hubungan langsung antara epistemologi (masalah prasyarat "*reliable knowledge*") dengan politik (masalah, kebutuhan, dan kepentingan yang dianggap penting dan sah oleh suatu komunitas ilmuwan yang mencari "*reliable knowledge*" itu).

Jadi, "refleksivitas" adalah kesadaran-diri ilmuwan dalam berteori, yang melibatkan dua hal:

- pengakuan sang ilmuwan terhadap adanya saling-kaitan antara konsepsi fakta dan nilai, di satu pihak, dengan agenda sosial dan politik komunitas ilmuwan tertentu di pihak lain. Konsepsi peneliti mengenai fenomena yang dipelajari tidak terlepas dari agenda sosial dan politik si peneliti itu.
- keterbukaan melakukan dialog untuk menilai mutu dari paradigma-paradigma.

Demikianlah, perkembangan ilmu Hubungan Internasional sejak 1980-an semakin diperkaya oleh banyaknya kegiatan teoritik dengan kecenderungan anti - atau pasca-positivime. Sementara teorisasi yang bersandar pada positivisme masih kokoh sebagai "*mainstream*", gerilya anti-kemapanan semakin berkembang dinamis. Teori-teori yang diilhami oleh pikiran Antonio Gramsci, filsafat pasca-modernisme, tradisi feminisme, poststrukturalisme, dan sebagainya semakin semarak muncul dengan komunitas intelektual yang semakin menonjol, lengkap dengan jurnal sendiri, didukung dengan "*caucus*" yang dibentuk di setiap asosiasi ilmu politik "*mainstream*".

Perkembangan yang dipelopori oleh ilmuwan teori kritis itu telah membuka cakrawala baru bagi studi Hubungan Internasional. Penjelajahan lebih lanjut ke wilayah baru ini sudah tentu akan memperkaya pemahaman kita mengenai perkembangan disiplin yang dinamis ini.

Referensi

- Abu-Lughod, Janet L. (1989). *Before European Hegemony: The World System A.D. 1250–1350*. New York: Oxford University Press.
- Acharya, Amitav & Barry Buzan (2017). "Why is there no Non-Western International Relations Theory? Ten years on." *International Relations of Asia Pacific*, 17: 341–370.
- Ake, Claude (1979). *Social Science as Imperialism: The Theory of Political Development*. (Lagos: Ibadan University Press).
- Beier, J. Marshall (2005). *International Relations in Common Place: Indigeneity, Cosmology, and the Limits of International Theory*. New York: Palgrave Macmillan.
- Capan, Zeynep Gulsah (2017). "Decolonising International Relations?" *Third World Quarterly* 38, no. 1: 1–15.
- Cruse, Mary (2019), *An Illustrated History of Science: From Agriculture to Artificial Intelligence* (London: Arcturus).
- Cox, Robert (1981). "Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relation Theory." *Millennium*, 10(2): 126-155.
- Fonseca, Melody, and Ari Jerrems (2012). "Decolonial thinking: A "new" perspective on International Relations Theory?" *Relaciones Internacionales*, no. 19: 103–121.
- Fonseca, Melody (2019), "Global IR and Western Dominance: Moving Forward or Eurocentric Entrapment?" *Millennium - Journal of International Studies* (September).
- Gogoi, Meenakshi (2015). "A Critical Analyses of Edward Said's Orientalism through Foucaultian Perspective of Knowledge-Power Relation." *International Multidisciplinary Research Journal* 2, no. 4: 16–24.
- Grosfoguel, Ramón (2011). "Decolonizing Post-Colonial Studies and Paradigms of Political Economy: Transmodernity, Decolonial Thinking, and Global Coloniality." *Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World* 1, no. 1: 1–38.
- Grosfoguel, Ramón (2013) "The Structure of Knowledge in Westernized Universities: Epistemic Racism/Sexism and the Four Genocides/Epistemicides of the Long 16th Century," *Human Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge*, Vol. 11, No. 1, Article 8.

- Hakim, Luqman, Muhadi Sugiono & Mohtar Mas' oed (eds. 2021). *The Global South: Refleksi dan Visi Studi Hubungan Internasional*. (Yogyakarta: UGM Press).
- Halperin, Sandra (2006). "International Relations Theory and the Hegemony of Western Conceptions of Modernity." Dalam Branwen Gruffydd Jones, *Decolonizing International Relations* (Lanham: Rowman & Littlefield).
- Inayatullah, Naeem & David L. Blaney (2003) *International Relations and the Problem of Difference* (New York: Routledge).
- Jones, Branwen Gruffydd (2006). *Decolonizing International Relation*. (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers).
- Kayaoglu, Turan (2010), "Westphalian Eurocentrism in International Relations Theory", *International Studies Review*, June 2010, Vol. 12, No. 2 (June).
- Krause, Keith & Michael C. Williams (1996). "Broadening the Agenda of Security Studies: Politics and Methods." *Mershon International Studies Review* 40: 229–254.
- Krishna, Sankaran (2012). "Decolonizing International Relations." *E-International Relation*. <https://www.e-ir.info/2012/10/08/decolonizing-international-relations/>.
- Kristensen, Peter Marcus (2015). "Revisiting the "American Social Science" – Mapping the Geography of International Relations." *International Studies Perspectives* 16, no. 3: 246–269.
- Lott, Anthony D. (2011). "History of International Relations." Dalam John T. Ishiyama & Marijke Breuning, *21st Century Political Science: A Reference Handbook*, (London: SAGE Publications).
- Mentan, T. (2015). *Unmasking Social Science Imperialism: Globalization Theory as a Phase of Academic Colonialism* (Mankon, Bamenda: Langaa Research & Publishing CIG).
- Mignolo, Walter D. (2008). "The Geopolitics of Knowledge and the Colonial Difference", Mabel Moraña, Enrique Dussel & Carlos A. Jáuregui, *Coloniality at Large: Latin America and the Postcolonial Debate* (Durham: Duke University Press).
- Nakano, Ryoko (2011). "Beyond Orientalism and "reverse Orientalism"." Dalam Robbie Shilliam, *International Relations and Non-Western Thought: Imperialism, colonialism and investigations of global modernity* (New York: Routledge).
- Nayak, Meghana dan Eric Selbin (2010). *Decentering International Relations* (London: Zed Books)
- Neufeld, Mark A. (1995). *The Restructuring of International Relations Theory* (Cambridge:

Cambridge University Press)

- Owen, John M. (1994). "How Liberalism Produces Democratic Peace." *International Security* 19, no. 2 (1994): 87-125.
- Pal, Maïa, & Doerthe Rosenow (2018). "Decolonising International Relations – some Pedagogical Reflections." *The Disorder of Things*. <https://thedisorderofthings.com/2018/03/04/decolonising-international-relations-some-pedagogical-reflections/>.
- Pasha, Mustapha Kamal (2011). "Untimely reflections." Dalam Robbie Shilliam, *International Relations and Non-Western Thought: Imperialism, colonialism and investigations of global modernity* (New York: Routledge).
- Picq, Manuela Lavinias (2013). "Critics at the edge? Decolonizing methodologies in International Relations." *International Political Science Review* 34, no. 4: 444-455.
- Prashad, Vijay (2007). *The Darker Nations: A People's History of the Third World*. (New York: The New Press).
- Prinsloo, Paul (2020), "Claiming humanity, reclaiming hope: the role of higher education in the 21st century" *Revista Nacional de Administración*. Volumen 11(1), 85 - 93 Enero-Junio.
- Quijano, Anibal (2000), Coloniality of Power and Eurocentrism in Latin America, *International Sociology*, Vol. 15: 215.
- Reiter, B. (2018). *Constructing the Pluriverse: A Geopolitics of Knowledge* (Duram: Duke University Press).
- Reiter, B. (2019). "Fuzzy epistemology: Decolonizing the social sciences." *Journal of Theory of Social Behavior*, 1-14. <https://doi.org/10.1111/jtsb.12229>.
- Robin, Ron Theodore (2003). *The Making of the Cold War Enemy - Culture and Politics in the Military-Intellectual Complex* (Princeton, NJ: Princeton University Press).
- Sabartnam, Meera (2011). "Politics, A Typology of Decolonising Strategies for the Study of World." *Millennium: Journal of International Studies* 39: 781-803.
- Said, Edward (1978). *Orientalism* (New York: Pantheon Books).
- Santos, Boaventura de Sousa Santos (2014). *Epistemologies of the South: Justice against Epistemicide* (Boulder, CO: Paradigm Publishers).
- Saurin, Julian (2006). "International Relations as the Imperial Illusion; or, the Need to Decolonize IR." Dalam Branwen Gruffydd Jones, *Decolonizing International Relations* (Lanham: Rowman & Littlefield).

- Seroto, Johannes (2018). "Dynamics of Decoloniality in South Africa." *Studia Historiae Ecclesiasticae*, 44(3): 1-14.
- Seth, Sanjay (2013). *Postcolonial Theory and International Relations: A Critical Introduction*. London: Routledge.
- Shilliam, Robbie (2011). "The perilous but unavoidable." Dalam Robbie Shilliam, *International Relations and Non-Western Thought: Imperialism, colonialism and investigations of global modernity* (New York: Routledge).
- Tickner, J. Ann (2011). "Dealing with Difference: Problems and Possibilities for Dialogue in International Relations." *Millennium: Journal of International Studies* 39: 607-618.
- Tétreault, Mary Ann & Ronnie D. Lipschutz (2009). *Global Politics as If People Mattered* (New York: Rowman & Littlefield Publishers).
- Waever, Ole (1998). "The Sociology of a Not So International Discipline: American and European Developments in International Relations." *International Organization* 52, no. 4: 687-727.
- Wallerstein, Immanuel (1997), "Eurocentrism and Its Avatars: the Dilemmas of Social Science", *Sociological Bulletin*, Vol. 46, No. 1 (March).
- Zondi, Siphamandla (2018). "Decolonising International Relations and Its Theory: A Critical Conceptual Meditation", *Politikon: South African Journal of Political Studies*, Vol. 45, No. 1

Mohtar Mas'ood adalah profesor studi ekonomi politik dan hubungan internasional di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada. Ia merupakan dewan pembina di Institute of International Studies (IIS). Penelitian untuk monograf ini dibiayai oleh Hibah Penelitian Departemen Ilmu Hubungan Internasional tahun anggaran 2023.





**Institute of
International
Studies**
DEPT. OF INTERNATIONAL RELATIONS
UNIVERSITAS GADJAH MADA

ISSN 2808-5221



Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia No.1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Indonesia
iis.fisipol@ugm.ac.id | +62 274 563362 EXT. 115 | +62 87884607707